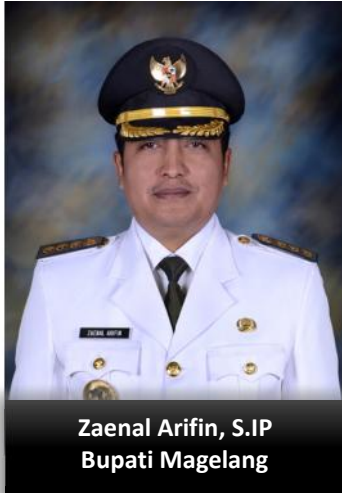


## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Masterplan Smart City Kabupaten Magelang dapat diselesaikan dengan baik.

Sebuah program dapat terlaksana dengan baik jika direncanakan secara komprehensif. Masterplan Smart City ini sebuah perencanaan program yang telah disusun secara partisipatif dan melibatkan seluruh stakeholder.

*Smart City* adalah konsep tata kelola kota yang disusun secara cerdas untuk menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang dihadapi masyarakat, melalui pengelolaan sumberdaya dan komunitas yang ada yang diwujudkan dalam strategi penyelesaian masalah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan situasi dan kondisi kota yang sejahtera dan nyaman.

Semoga Masterplan Smart City Kabupaten Magelang ini dapat menjadi panduan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Kabupaten Magelang dengan cerdas sehingga pembangunan di Kabupaten Magelang dapat terus berjalan dengan baik dan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Kota Mungkid,  
BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN S.IP

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Tujuan Masterplan.....	10
1.3. Landasan Hukum.....	10
1.4. Kerangka Pikir <i>Smart City</i> .....	11
<b>BAB II VISI MISI <i>SMART CITY</i> .....</b>	<b>21</b>
2.1. Visi <i>Smart City</i> Kabupaten Magelang.....	21
2.2. Sasaran <i>Smart City</i> Kabupaten Magelang.....	22
2.3. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang .....	24
<b>BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i> .....</b>	<b>26</b>
3.1. SMART GOVERNANCE .....	26
3.2. SMART BRANDING .....	27
3.3. SMART ECONOMY.....	28
3.4. SMART LIVING.....	29
3.5. SMART SOCIETY.....	30
3.6. SMART ENVIRONMENT .....	31
<b>BAB IV RENCANA AKSI <i>SMART CITY</i> KABUPATEN MAGELANG .....</b>	<b>33</b>
4.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan <i>Smart City</i> .....	33
4.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung <i>Smart City</i> .....	37
4.2.1. Komponen Infrastruktur .....	38
4.2.2. Rencana Tahapan Pembangunan Infrastruktur .....	41

4.3. Rencana Pengembangan Perangkat Lunak <i>Smart City</i> .....	41
4.3.1. Standar Arsitektur .....	42
4.3.2. Klasifikasi Perangkat Lunak <i>Smart City</i> .....	43
4.3.3. Tahapan pengembangan.....	48
4.4. Rencana Penguatan Literasi <i>Smart City</i> .....	49
<b>BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY</b> .....	51
5.1. Sinkronisasi Program Smart City dengan Program RPJMD .....	52
5.2. Peta Jalan <i>Smart City</i> Kabupaten Magelang .....	82
5.3. Quick Win Smart City .....	100
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Elemen Smart Readiness .....	12
Gambar 2. Dimensi <i>Smart City</i> .....	13
Gambar 3. Smart Governance .....	14
Gambar 4. Smart Branding .....	15
Gambar 5. Smart Economy .....	16
Gambar 6. Smart Living .....	17
Gambar 7. Smart Economy .....	18
Gambar 8. Smart Environment .....	19
Gambar 9. Kerangka Pikir Smart City Kabupaten Magelang .....	20
Gambar 10. Hubungan Visi Misi Kabupaten Magelang dengan Dimensi Smart City .....	25
Gambar 11. Kerangka arsitektur perangkat lunak <i>Smart City</i> Kab. Magelang .....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekomendasi Suprastruktur <i>Smart City</i> Magelang.....	34
Tabel 2. Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> pada Elemen Smart Governance.....	52
Tabel 3. Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> pada Elemen Smart Branding.....	59
Tabel 4. Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> pada Elemen Smart Economy .....	63
Tabel 5. Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> pada Elemen Smart Living .....	65
Tabel 6. Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> pada Elemen Smart Society .....	67
Tabel 7. Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> pada Elemen Smart Environment .....	76
Tabel 8. Peta Jalan <i>Smart City</i> Kabupaten Magelang.....	82

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Secara umum, untuk disebut sebagai kota besar dan makmur, kota-kota di seluruh dunia memiliki standar dan kualitas yang baik di berbagai sektor kegiatan serta kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan kombinasi antara perencanaan kota, peningkatan kualitas tata pemerintahan, teknologi yang inovatif, masyarakat yang lebih sejahtera dan bisnis yang berkembang untuk menghasilkan apa yang dikenal sebagai *Smart City*.

Untuk mencapai predikat *Smart City* diperlukan pengembangan infrastruktur yang cerdas dan penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang akan berguna bagi pemerintah, masyarakat dan pebisnis lokal. Menjadi *Smart City* juga berarti harus terus berinovasi dan berkembang dengan cara yang lebih baik. Selain investasi modal, diperlukan metode yang inovatif dan efisien dalam menemukan kebutuhan masyarakat yang tinggal, bekerja, atau bahkan hanya mengunjungi Kabupaten Magelang.

Dalam era teknologi seperti sekarang ini, diperlukan pendekatan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi yang inovatif dan smart infrastruktur. Perlu dipahami, apabila perubahan tersebut baik, perlu kita meningkatkan standar dan kualitas daripada tetap mempertahankan pendekatan tradisional.

Tren persaingan dunia sudah bergeser dari sekedar membangun daya saing nasional atau negara menuju daya saing kota atau daerah. Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Denpasar, Makassar dan lain-lain, bersaing dengan Kota Singapura, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Osaka, Seoul, Tokyo, Mumbai dan lain-lain untuk menjadi pilihan masyarakat global dalam melakukan aktifitas investasi, perdagangan, wisata, kemitraan dan lain-lain. Pada saat yang sama masyarakat di suatu daerah semakin berharap akan lingkungan tempat tinggal yang layak (*livable*), inovatif dan berkelanjutan (*sustainable*). Tuntutan sebuah kota atau lingkungan yang nyaman, aman, sehat, mudah, dan berkemakmuran menjadi indikator kota yang berdaya-saing.

Pada saat yang sama, tren revolusi digital secara drastis telah mengubah cara hidup dan bahkan masa depan peradaban umat manusia. Gerd Leonhard menggambarkan bahwa gerakan digitalisasi telah membawa perubahan yang

bersifat tidak hanya eksponensial tetapi juga kombinatorial. Mengantarkan manusia ke era dimana perubahan yang terjadi pada peradaban manusia untuk 20 tahun ke depan akan mengalahkan perubahan yang pernah terjadi sejak tiga ratus tahun yang lalu.

Salah satu fenomena perubahan yang bisa kita amati adalah terjadinya akselerasi proses urbanisasi di seluruh dunia. Pada tahun 2014, sebuah studi oleh PBB tentang tren urbanisasi dunia menunjukkan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia, lebih dari setengah populasi manusia (54%) hidup di daerah urban. Sebagai gambaran pada tahun 1950 jumlah populasi urban dunia hanya 30%.

Tren urbanisasi ini akan terus berlanjut dan diperkirakan pada tahun 2050 populasi urban akan mencapai angka 66% dari seluruh populasi dunia. Di Indonesia sendiri populasi urban telah mencapai 53.3% di tahun 2015 (BPS RI) dan berdasarkan penelitian oleh Citiasia Center for Smartnation (CCSN) jumlah ini akan meningkat menjadi 68% di tahun 2035.

Digitalisasi juga telah memperluas arti dari urbanisasi itu sendiri. Terminologi urbanisasi lahir pertamakali pada masa revolusi industri, ketika kehidupan berubah dari pola ekonomi pertanian ke pola ekonomi industri (manufaktur). Warga desa berbondong-bondong berpindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja di pabrik-pabrik sebagai kesempatan baru yang muncul terutama akibat ditemukannya konsep mesin uap, mekanisasi, dan elektrifikasi. Pada masa ini batasbatas dimensi fisik sangat jelas terlihat. Hal ini sangat kontras dengan apa yang terjadi pada masa kini, dalam dunia digital batas-batas dimensi fisik begitu samar atau bahkan pada kasus-kasus tertentu batas-batas dimensi fisik ini benar-benar tidak ada. Artinya urbanisasi tidak bisa lagi diejawantahkan sebagai migrasi fisik semata. Melainkan juga migrasi gaya hidup dan interaksi socio-cultural masyarakat dari pola-pola bersifat rural ke pola yang bersifat urban.

Masyarakat urban merupakan sebuah sistem kompleks dimana aktor-aktor penyusunnya yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Lahir dan berkembangnya pusat-pusat masyarakat yang bersifat urban akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumberdaya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan kota atau

daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan *Smart City* tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*.

Tren gerakan pembangunan kota atau daerah berbasis *Smart City* bisa kita saksikan di berbagai belahan dunia seperti Barcelona, Tokyo, London, Berlin, Amsterdam, Melbourne, Seoul, Shanghai, Mumbai, Singapura dan lain-lain. Di setiap kota di berbagai belahan dunia tersebut memiliki kisah sukses pembanguna *Smart City* yang berbeda-beda sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh setiap kota. Di Korea, sebuah kawasan reklamasi seluas 600 hektar dibangun dari nol sebagai sebuah *Smart City*, di Dubai menjadikan Masdar sebagai Kota yang membangun program kemandirian energi dengan energi surya dan terbarukan serta bertekad menjadi kota yang bebas emisi karbon, Amsterdam fokus pada pembangunan Smart People, Smart Energy, dan Smart Waste Management. Di Singapura, pembangunan *Smart City* langsung dikendalikan dibawah Prime Minister Office sebagai sebuah program untuk warga, pebisnis, dan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dengan memanfaatkan teknologi, ide, aplikasi, dan big data.

Namun perlu dipahami bahwa konsep *Smart City* adalah konsep yang unik dan dinamis. Inisiasi inisiasi yang muncul sebagai solusi akan permasalahan kota yang satu tidak serta merta bisa diaplikasikan sebagai solusi akan permasalahan yang muncul di kota yang lain. Hal ini terjadi karena *Smart City* menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan teknologi TIK, sensor, dan *data analytic* sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (*enabling factor*). Pembangunan berbasis *Smart City* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain. Jadi inisiasi *Smart City* yang muncul bukanlah solusi mutlak yang menutup pintu inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan adanya panduan agar pemerintah kabupaten dan kota mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep *Smart City* dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki.

Proses pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang memerlukan waktu dan tidak seketika. Diperlukan komitmen dan perencanaan yang matang serta menyeluruh. Pada tahap-tahap tertentu, usaha pembangunan *Smart City* juga



perlu melibatkan semua pihak di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, baik dari pihak warga, pemerintah maupun swasta. Selain untuk mewujudkan terciptanya sinkronisasi, hal ini juga dimaksudkan untuk menyamakan (*alignment*) pemahaman akan visi, misi, dan mempertemukan kepentingan yang berbeda dari setiap pihak serta menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) atas rencana pembangunan *Smart City* yang diinisiasi. Dengan kata lain pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang kontinu, bertahap, dan bersifat multi sektoral oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berjangka waktu dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen masterplan *Smart City*.

Pada dasarnya konsep *Smart City* berfokus pada pengembangan elemen manusia melalui pemanfaatan teknologi. Jadi melalui teknologi setiap elemen didorong untuk berpikir kreatif dan aktif dalam melahirkan inovasi-inovasi demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman. Masterplan *Smart City* hadir sebagai wadah berbagai inovasi yang muncul dari proses berpikir kreatif dan identifikasi aktif. Masterplan *Smart City* memungkinkan setiap ide dapat terakomodasi ataupun memperkaya ide yang lainnya. Masterplan *Smart City* juga memastikan bahwa suatu ide tidak akan berdiri sendiri melainkan akan menjadi bagian dari suatu rencana implementasi yang terintegrasi dan komprehensif.

Masterplan *Smart City* berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan. Masterplan ini berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kota. Sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi, identitas dan karakter kota, masterplan *Smart City* mempermudah pemerintah dalam mengurai masalah khas perkotaan.

Masterplan *Smart City* juga memastikan proses transformasi menuju konsep kota cerdas baik itu pada tahap perencanaan, implementasi, maupun monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sehingga sebuah masterplan *Smart City* haruslah memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah
2. Berpeluang untuk berhasil dilaksanakan yang maksimal
3. Obyektif, tepat sasaran, dan tepat guna
4. Berkesinambungan dalam menjaga keseimbangan kebutuhan ekonomi, social, dan lingkungan
5. Dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan kemampuan daerah.

## 1.2. Tujuan Masterplan

Adapun tujuan dari disusunnya Masterplan *Smart City* Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Magelang;
2. Sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Magelang;
3. Dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Magelang
4. Menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan *business process* pemerintah daerah, OPD lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi.
5. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Magelang dalam dokumen perencanaan *Smart City* Magelang;
6. Mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

## 1.3. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Magelang Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart City* di Kabupaten Magelang.

#### 1.4. Kerangka Pikir *Smart City*

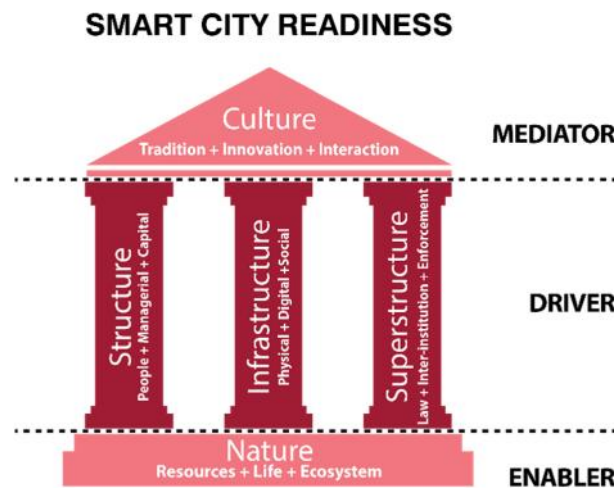
Kerangka pikir (*frameworks*) *Smart City* atau Daerah Pintar telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti Smart Cities Council, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan *Smart City*. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang dikembangkan oleh lembaga *think tank* dalam negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Istilah *smart* dalam bahasa Indonesia disebut dengan “pintar”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pandai; cakap”, “cerdik; banyak akal”, dan “mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu)” atau “cerdas” yang diartikan sebagai “sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran” dan “sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat)”. Kata “Kota Pintar” dipilih untuk menunjukkan pengertian yang lebih luas dari kata cerdas atau “*intelligent*”. Namun demikian penggunaan kata “Kota Cerdas” juga diperkenankan jika ada daerah yang memilih menggunakan istilah tersebut.

Dalam membangun *Smart City*, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness*. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur.

1. **Struktur**; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
2. **Infrastruktur**; pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
3. **Suprastruktur**; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

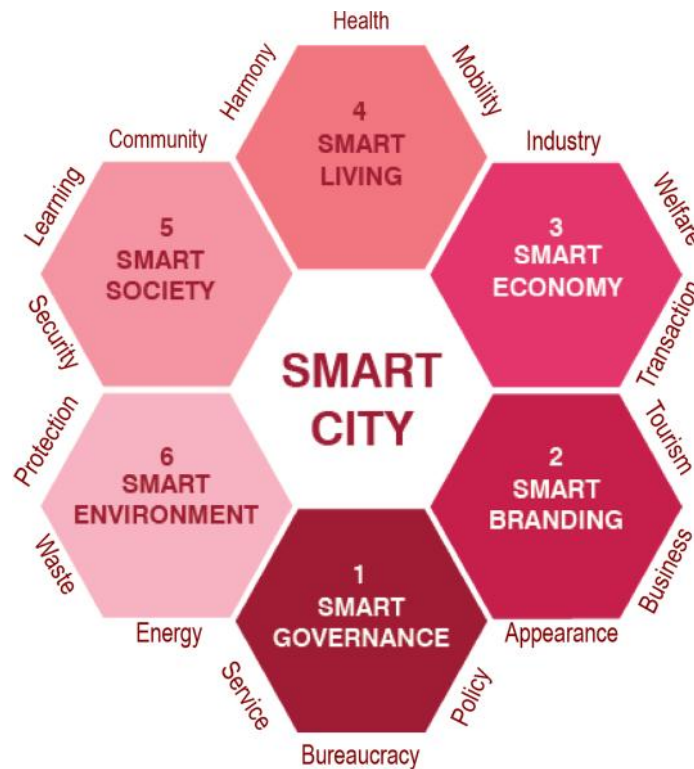
Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Elemen Smart Readiness

Sumber: *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*.

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah *Smart City* adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam *Smart City* itu sendiri.



Gambar 2. Dimensi *Smart City*

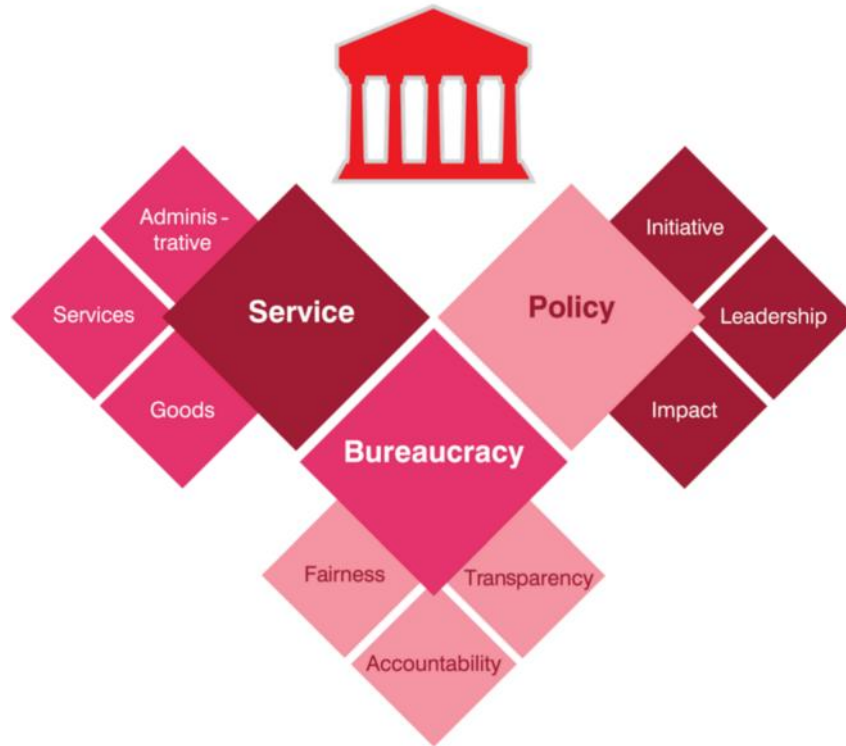
Sumber: *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*.

### 1. Smart Governance

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga Smart Governance di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

## SMART GOVERNANCE



Gambar 3. Smart Governance

Sumber: *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*

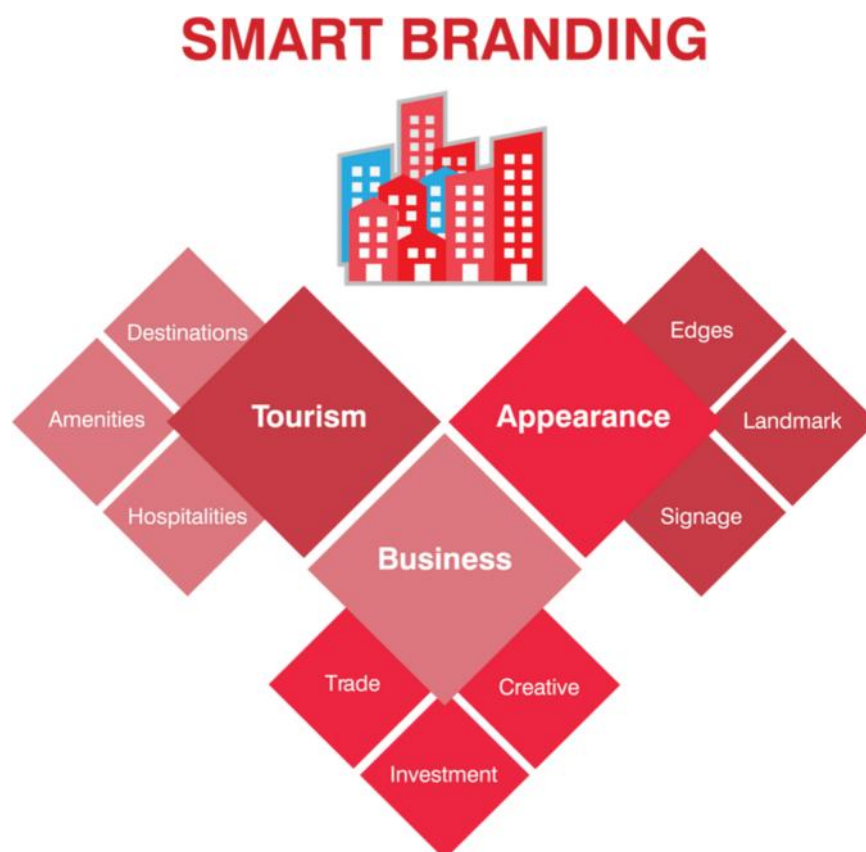
Tentu saja dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. Smart Governance harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

### 2. Smart Branding

Dimensi kedua dalam *Smart City* adalah Smart Branding, yaitu branding daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

Smart Branding menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.

Sehingga pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan *brand value* perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 4. Smart Branding

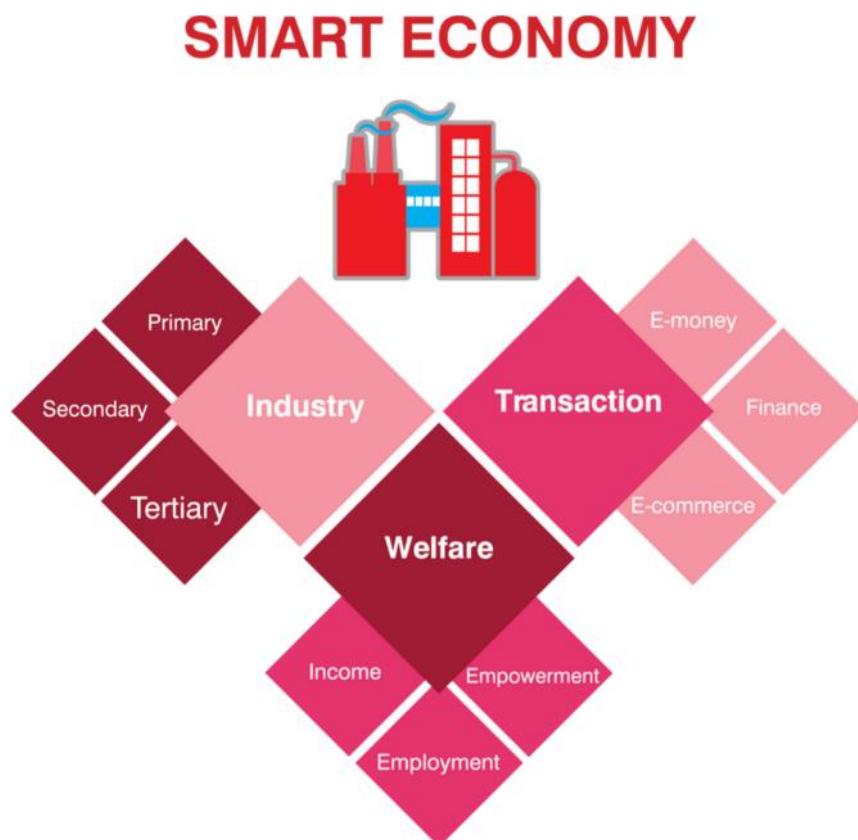
Sumber: *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*



Sasaran dari smart branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

### 3. Smart Economy

Dimensi ketiga dalam *Smart City* adalah smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart economy dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.



Gambar 5. Smart Economy

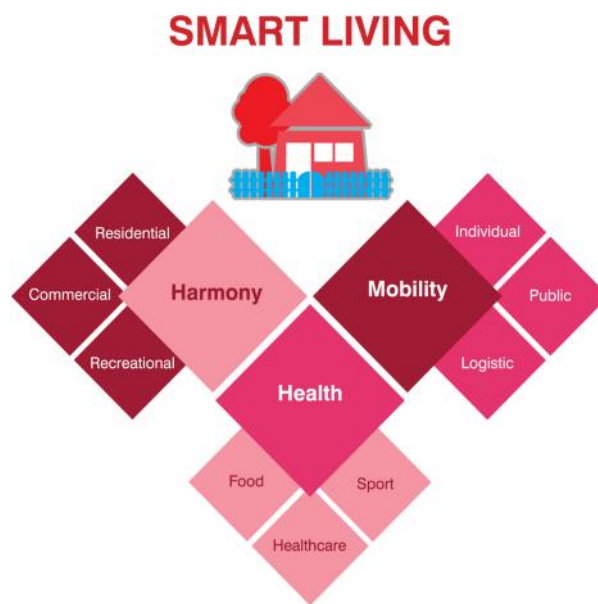
Sumber: *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*



Sasaran dari dimensi smart economy di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam smart economy, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

#### 4. Smart Living

Smart living menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City*.



Gambar 6. Smart Living

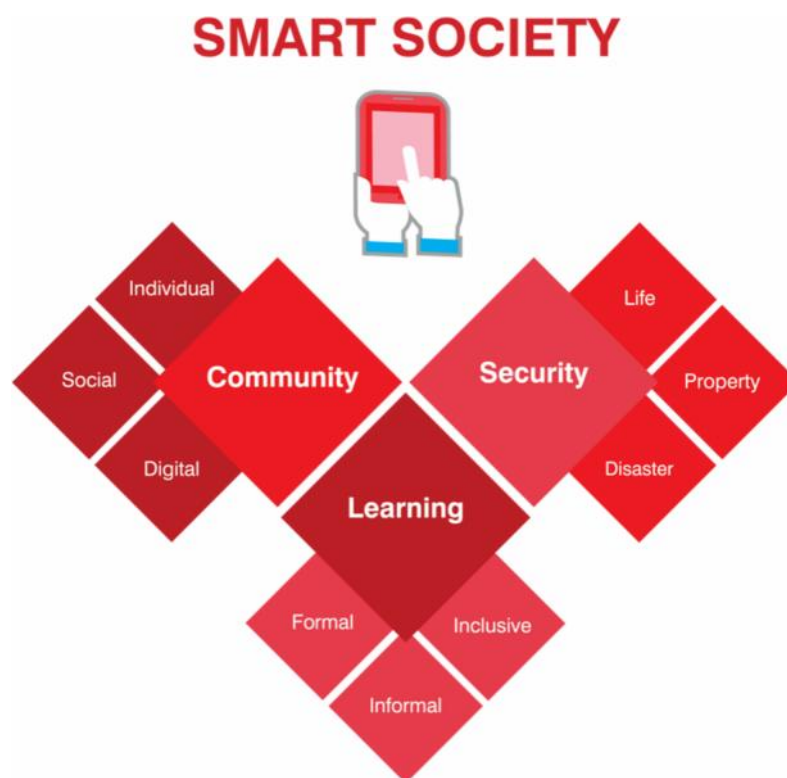
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari *smart living* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

## 5. Smart Society

Smart society sebagai bagian dari *Smart City* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Sasaran dari smart society dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari smart society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam smart society, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).



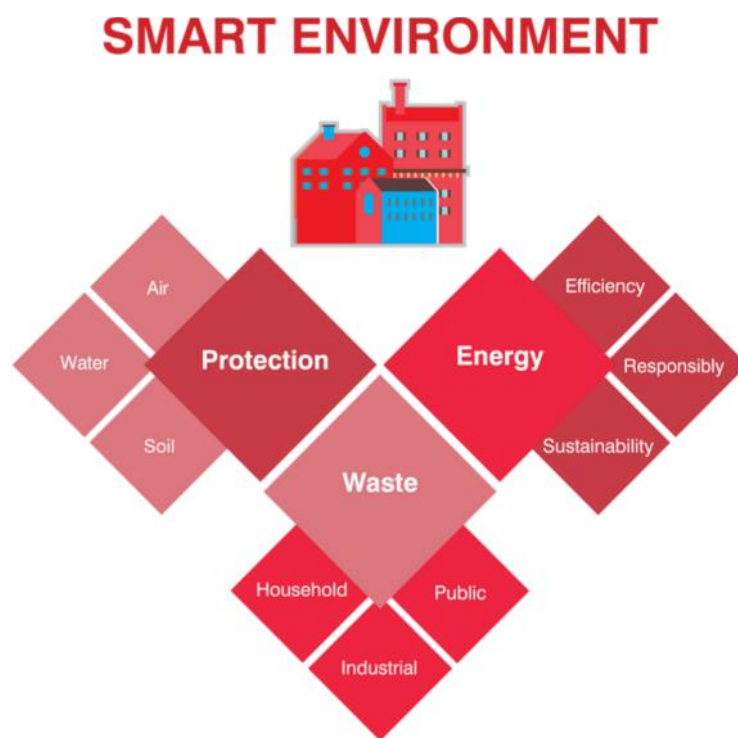
Gambar 7. Smart Economy

Sumber: *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*

## 6. Smart Environment

Dimensi keenam dalam sebuah *Smart City* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari smart environment di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

Sasaran dari smart environment adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.



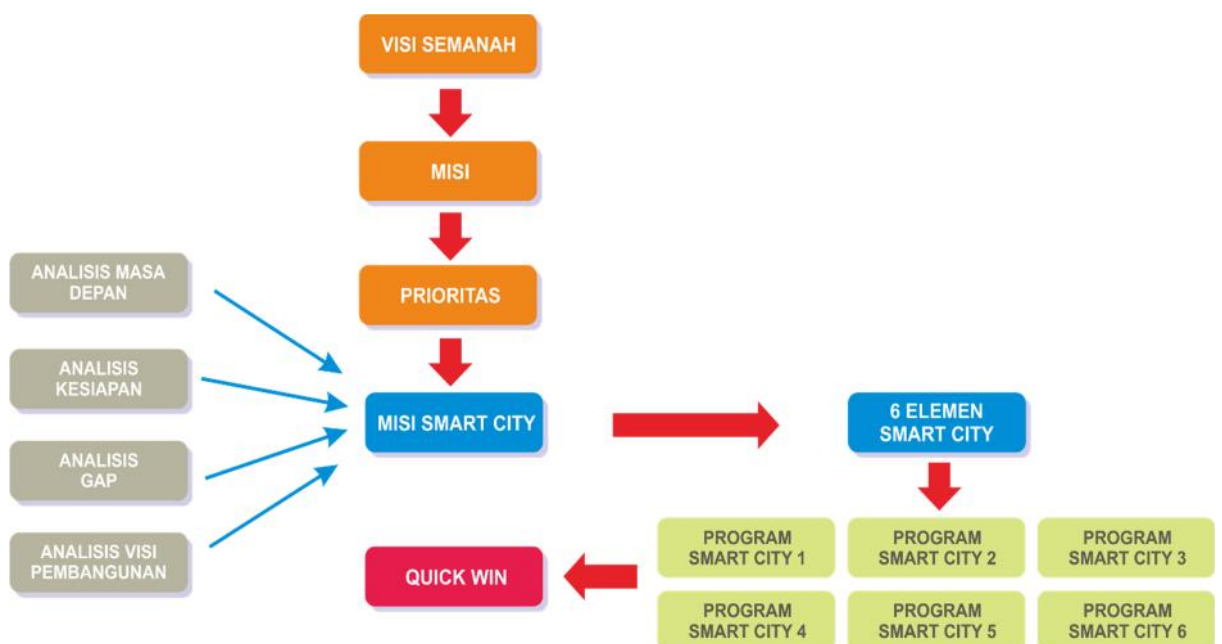
Gambar 8. Smart Environment

Sumber: *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*

Selanjutnya kerangka pikir *Smart City* di Kabupaten Magelang adalah menentukan program-program *Smart City* yang mendukung 6 elemen

(dimensi) *Smart City*. Program-program *Smart City* adalah dalam rangka menjalankan misi *Smart City* yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Magelang yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024

Kerangka pikir *Smart City* Kabupaten Magelang secara keseluruhan dapat dilihat di gambar 9.



Gambar 9. Kerangka Pikir Smart City Kabupaten Magelang

Berdasarkan diagram kerangka pikir smart city Kabupaten Magelang di atas, dapat dilihat bahwa program Smart City adalah percepatan implementasi prioritas pembangunan Kabupaten Magelang yang selaras visi dan misi Kabupaten Magelang yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024.

## **BAB II**

### **VISI MISI *SMART CITY***

#### **2.1. Visi *Smart City* Kabupaten Magelang**

**“Terwujudnya SEDAYA AMANAH (Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah)  
dengan kreatif, inovatif dan kolaboratif dalam pelayanan publik”**

Visi *Smart City* Tersebut, kemudian dijabarkan dalam Misi Yaitu: **“Mewujudkan Magelang yang berdaya saing, informatif, komunikatif, akuntabel dan transparan didukung kolaborasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik”**.

Sedangkan sasaran dari capaian Misi *Smart City* tersebut dirinci menjadi beberapa rinci sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi (IT) yang memadai
2. Peningkatan daya saing daerah bertumpu pada potensi unggulan yang dimiliki.;
3. Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah;
4. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, dan nyaman bagi masyarakat;
5. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap Teknologi informasi;
6. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup Kabupaten Magelang yang baik, dan berkelanjutan.

## 2.2. Sasaran *Smart City* Kabupaten Magelang

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran *Smart City* Kabupaten Magelang adalah:

1. Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi (IT) yang memadai;

Indikator dan targetnya adalah:

- a. Tersedianya sistem aplikasi dan basis data pendukung pemerintahan yang terintegrasi, antara lain sistem perencanaan pembangunan mulai dari musrenbang hingga penetapan APBD yang sudah dapat dioperasikan pada tahun 2020
  - b. Tersedianya SDM pengelola sistem aplikasi yang memadai pada akhir tahun 2019
  - c. Tersedia dasar hukum/peraturan sebagai pijakan pengoperasian sistem aplikasi yang disahkan setiap sistem aplikasi akan mulai dioperasikan
2. Peningkatan daya saing daerah bertumpu pada potensi unggulan yang dimiliki.

Indikator dan targetnya adalah:

- a. Tersedianya ekosistem pariwisata (*Tourism Branding*) di Kabupaten Magelang;
  - b. Tersedianya ekosistem bisnis daerah (*Business Branding*) di Kabupaten Magelang;
  - c. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investor di Kabupaten Magelang; dan
  - d. Terciptanya wajah kota (*city appearance branding*) Kabupaten Magelang sebagai kota pariwisata
3. Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah;

Indikator dan targetnya adalah:

- a. Terwujudnya ekosistem ekonomi yang bertumpu pada pariwisata, pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri olahan;
  - b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
  - c. Terwujudnya ekosistem transaksi keuangan;
4. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, dan nyaman bagi masyarakat;

Indikator dan targetnya adalah:

- a. Terwujudnya harmonisasi tata ruang wilayah;
  - b. Tersedianya prasarana kesehatan yang berkualitas; dan
  - c. Tersedianya transportasi publik yang nyaman;
5. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap Teknologi informasi;

Indikator dan targetnya adalah:

- a. Terwujudnya interaksi masyarakat yang efisien;
  - b. Terbangunnya ekosistem belajar yang efisien; dan
  - c. Terwujudnya sistem keamanan masyarakat yang terpadu;
6. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup Kabupaten Magelang yang baik, dan berkelanjutan;

Indikator dan targetnya adalah:

- a. Terwujudnya perlindungan ekosistem lingkungan dan kawasan lahan kritis;
- b. Terkelolanya limbah dan sampah;
- c. Meningkatnya cakupan penghijauan di kawasan resapan air;
- d. Menurunnya persentase sungai tercemar;

### 2.3. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang menetapkan program prioritas pembangunan yang dituangkan dalam **Dasa Cita** Kabupaten Magelang, yang terdiri dari 10 program prioritas sebagai berikut :

- ) Kelompok program untuk meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang **Sejahtera** dan berakhlak Mulia :
  1. Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia
  2. Pendidikan
  3. Kesehatan
  4. Penanggulangan Kemiskinan
- ) Kelompok program untuk meningkatkan **Daya Saing** Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup:
  1. Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan UKM
  2. Sarana dan Prasarana Publik
  3. Lingkungan Hidup
  4. Kepemudaan dan Olah Raga
- ) Kelompok program untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang **Amanah**
  1. Birokrasi dan Tata Kerja Pemerintahan
  2. Ketenteraman, Ketertiban, dan Penanggulangan Bencana

Program *Smart City* Kabupaten Magelang salah satu fungsinya adalah melakukan percepatan pembangunan daerah yang selaras dengan program prioritas (Dasa Cita) Kabupaten Magelang. Berikut pemetaan dimensi *Smart City* terhadap Dasa Cita Kabupaten Magelang:

1. Smart Governance mencakup:
  - ) Cita ke-9: Birokrasi dan Tata Kerja Pemerintahan
2. Smart Branding mencakup:
  - ) Cita ke-5: Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan UKM
3. Smart Economy mencakup:
  - ) Cita ke-4: Penanggulangan Kemiskinan
  - ) Cita ke-5: Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan UKM



4. Smart Living mencakup:

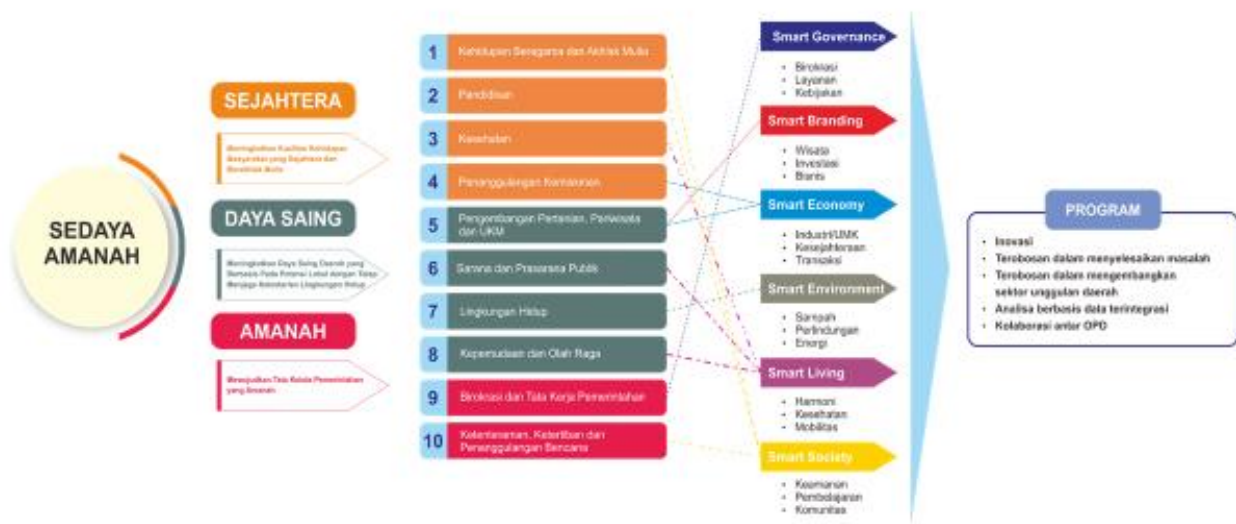
- ) Cita ke-3: Kesehatan
- ) Cita ke-6: Sarana dan Prasarana Publik
- ) Cite ke-8: Kepemudaan dan Olah Raga

5. Smart Society mencakup:

- ) Cita ke-1: Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia
- ) Cita ke-2: Pendidikan
- ) Cita ke-10: Ketenteraman, Ketertiban, dan Penanggulangan Bencana

6. Smart Environment mencakup:

- ) Cita ke-7: Lingkungan Hidup



Gambar 10. Hubungan Visi Misi Kabupaten Magelang dengan Dimensi Smart City

## BAB III

### STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

#### 3.1. SMART GOVERNANCE

Smart Government atau pemerintahan yang cerdas adalah kunci utama dalam pembentukan Smart City. Pemerintah sebagai bagian dari fundamental sebuah negara, mempunyai tugas untuk membentuk paradigma atau pandangan kepada masyarakat tentang kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah yang pintar merupakan pemerintah yang peduli dan transparan terhadap rakyatnya, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan kemauan masyarakat terhadap pemerintahnya. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah Good Governance. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum.

Beberapa tujuan dari smart governance ini yaitu:

1. Meningkatkan kualitas layanan publik dengan beberapa Strategi sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kapasitas SDM Penyedia layanan;
  - b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang layanan publik.
2. Meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi dengan beberapa Strategi sebagai berikut:
  - a. Menyederhanakan prosedur birokrasi
  - b. Pembuatan SOP bersama pada OPD yang memiliki pelayanan publik yang sama
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan
  - d. Optimalisasi Sistem/ Aplikasi Data dan informasi

Strategi yang dikembangkan untuk mewujudkan Smart Governance merupakan penjabaran untuk mewujudkan misi **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah** yang diamanahkan pada RPJMD Kab Magelang 2019-2024.

### 3.2. SMART BRANDING

Branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya (membedakan) dari barang atau jasa pesaing. Fungsi Branding adalah untuk menanamkan image dan citranya di masyarakat, jika perusahaan/lembaga tersebut memiliki produk yang mereka buat, sehingga dengan adanya branding (merk dagang atau corporate identity) diharapkan brand atau merk mereka akan senantiasa diingat oleh masyarakat atau konsumennya dalam jangka waktu yang lama. Jadi berdasarkan hal tersebut, smart branding merupakan salah satu faktor pendukung Smart city.

Adapun tujuan dari smart branding ini adalah:

1. Mengembangkan daya saing komoditas unggulan berbasis potensi wilayah secara berkelanjutan dengan beberapa Strategi sebagai berikut:
  - a. Sinergisitas antara pengelolaan dan pengembangan dengan pemasaran
  - b. Regulasi dan kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan produk unggulan
  - c. Fasilitasi pemasaran produk-produk unggulan berbasis potensi wilayah
  - d. Publikasi dan promosi secara multi channel terhadap komoditas unggulan mengacu pada potensi masing-masing;
  - e. Meningkatkan indikator akses (terhadap kegiatan publikasi dan promosi)
2. Membangun infrastruktur dan memasarkan pariwisata, melalui beberapa **strategi** sebagai berikut:
  - a. Penyediaan infrastruktur pariwisata yang memadai
  - b. Penyediaan jaringan transportasi penunjang pariwisata
  - c. Pemasaran pariwisata melalui pariwisata go digital
  - d. penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penunjang interaksi
  - e. Penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

3. Integrasi pemasaran *offline* dan *online* untuk produk-produk unggulan UKM, melalui **strategi**
  - a. pemasaran produk unggulan UKM secara online dan offline
  - b. Penguatan kapasitas kelembagaan UKM dalam hal *marketing* dan manajemen bisnis

Strategi yang dikembangkan untuk mewujudkan Smart Branding merupakan penjabaran untuk mewujudkan misi **Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup** yang diamanahkan pada RPJMD Kab Magelang 2019-2024.

### 3.3. SMART ECONOMY

Adapun tujuan dari *smart economy* ini yaitu: Meningkatkan pembinaan petani dan pelaku usaha

1. Penguatan komoditas unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, melalui **Strategi** sebagai berikut:
  - a. Memfasilitasi pemanfaatan market place untuk produsen dan konsumen dalam memasarkan produk.
  - b. Memfasilitasi Produsen untuk melakukan Ekspansi pasar, dalam rangka perluasan pasar untuk produk produk daerah
2. Menyediakan ekosistem rantai pasokan (*supply chain*) komoditas unggulan, melalui **strategi**:
  - a. Menyediakan saluran distribusi
  - b. Meningkatkan Rantai dan kualitas pasokan serta pengembangan cluster industry
  - c. Meminimalisasi Biaya operasi
3. Pemberdayaan petani dan masyarakat pelaku usaha mulai dari produksi hingga pemasaran komoditas-komoditas unggulan melalui **Strategi** meningkatkan pembinaan petani dan pelaku usaha.

Strategi yang dikembangkan untuk mewujudkan *Smart Economy* merupakan penjabaran untuk mewujudkan misi **Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal** yang diamanahkan pada RPJMD Kab Magelang 2019-2024.

### 3.4. SMART LIVING

Adapun tujuan dari *smart Living* ini yaitu:

1. Harmonisasi tata ruang wilayah berupa Pembangunan infrastruktur fisik bagi masyarakat berbasis pendekatan spasial kewilayahan, melalui **strategi**:
  - a. Pembangunan perumahan di kawasan pemukiman bagi masyarakat yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan
  - c. Pembangunan fasilitas perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
2. Penyediaan informasi spasial untuk masyarakat, melalui **strategi** menyiapkan informasi spasial yang dapat diakses oleh masyarakat melalui teknologi informasi yang ada
3. Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik melalui **strategi**:
  - a. Menyiapkan jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyarakat untuk mengakses lokasi-lokasi penting ke pusat-pusat perdagangan, pertanian, destinasi wisata dan lokasi strategis lainnya;
  - b. Penyediaan moda transportasi umum bagi masyarakat dipedesaan untuk mengakses lahan-lahan produktif pertanian.
4. Peningkatan penyediaan akses terhadap layanan publik bagi masyarakat melalui **strategi**:
  - a. Penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat;
  - b. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat;
  - c. Penyediaan fasilitas social dan budaya tempat berkumpul bagi masyarakat;

Strategi yang dikembangkan untuk mewujudkan *Smart Living* merupakan penjabaran untuk mewujudkan misi **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia** yang diamanahkan pada RPJMD Kab Magelang 2019-2024.

### 3.5. SMART SOCIETY

Adapun tujuan dari *smart society* ini yaitu:

1. Mewujudkan interaksi masyarakat yang efektif dan efisien (community) melalui **strategi**:
  - a. Menyediakan akses internet yang terhubung antar rumah tangga;
  - b. Menyediakan akses internet bagi masyarakat umum;
  - c. Menyediakan Sarana dan pendukung dan penguatan kapasitas SDM penyuluh Ketenagakerjaan
2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan (formal dan informal), melalui **strategi**:
  - a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengajar;
  - b. Penyediaan internet di tempat pendidikan;
  - c. Meningkatkan kualitas SDM bagi penjaga situs-situs budaya dan memberikan publikasi informasi tentang situs-situs budaya;
  - d. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
3. Mewujudkan sistem keamanan dan tanggap darurat masyarakat (security), melalui **strategi** sebagai berikut
  - a. Mengaktifkan kelompok siskamling
  - b. Pembuatan Earli Warning System (EWS)
4. Peningkatan pemberdayaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), melalui **strategi** sebagai berikut:
  - a. pelatihan dan peningkatan SDM PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
  - b. pelatihan dan peningkatan SDM PMKS

Strategi yang dikembangkan untuk mewujudkan *Smart Living* merupakan penjabaran untuk mewujudkan misi **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia** yang diamanahkan pada RPJMD Kab Magelang 2019-2024.

### 3.6. SMART ENVIRONMENT

Adapun tujuan dari *Smart Environment* ini yaitu:

1. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai, melalui **strategi**:
  - a. Optimalisasi RTH di semua kawasan sesuai SPM RTH;
  - b. Optimalisasi PJU skala perkotaan dan kawasan;
  - c. mengintegrasikan semua unsur yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sumberdaya yang ada baik sumber daya kehutanan, kelautan dan sumber air bersih;
  - d. optimalisasi penanganan sampah sampai ditingkat desa/kelurahan dari sumber sampah sampai ke TPA;
  - e. optimalisasi pengelolaan air limbah dalam lingkungan permukiman;
  - f. Penanganan Drainase skala perkotaan dan kawasan permukiman;
  - g. Perlindungan terhadap sumber air (mata air) dan identifikasi titik sumber air baku (air tanah) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
  - h. Peningkatan jaringan air bersih di kawasan perkotaan dan perdesaan.
  - i. Pembangunan, Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur keairan (bendungan, embung, saluran irigasi teknis dan non teknis);
  - j. menyesuaikan pembangunan lingkungan berdasarkan daya dukung lahan;
  - k. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, melalui **strategi**:
  - a. Meningkatnya penanganan pencemaran lingkungan hidup;
  - b. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)

- c. Pemanfaatan potensi bahan bakar residu untuk penyediaan bahan bakar industri/perkebunan

Strategi yang dikembangkan untuk mewujudkan *Smart Living* merupakan penjabaran untuk mewujudkan misi **Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup** yang diamanahkan pada RPJMD Kab Magelang 2019-2024.



## BAB IV

### RENCANA AKSI *SMART CITY* KABUPATEN MAGELANG

#### 4.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan *Smart City*

Dimensi kebijakan dan kelembagaan ini perlu mendapat prioritas utama, karena keberhasilan pelaksanaan *Smart City* sangat ditentukan oleh adanya regulasi yang baik sebagai landasan melakukan pengawasan dan tindakan jika terjadi kekeliruan. Untuk mereduksi resiko yang ditimbulkan atas lemahnya dimensi kebijakan ini, maka perlu langkah – langkah berikut.

1. Mempercepat penyusunan kelengkapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-government/TIK Pemerintah Kabupaten Magelang
2. Penetapan semua dokumen yang diperlukan seperti dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Rencana Strategis, Framework e-government, dan semua SOP sebagai acuan dalam pengelolaan e-government Pemerintah Kabupaten Magelang
3. Mempercepat penerapan pengembangan e-government dalam birokrasi dengan mendorong perubahan proses birokrasi dan budaya kerja berbasis elektronik dengan menyusun aturan/kebijakan untuk transformasi proses birokrasi ini.
4. Membangun dan memperkuat standardisasi pendelegasian tugas dan kewenangan pengembangan TIK kepada Dinas KOMINFO selaku koordinator dan seluruh OPD sebagai salah satu upaya menuju efektifitas dan efisiensi pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK di Pemerintah Kabupaten Magelang.
5. Melakukan sosialisasi, kontrol dan monitoring atas kebijakan strategis yang sah untuk diimplementasikan, untuk memastikan bahwa kebijakan telah dilaksanakan dengan baik di seluruh OPD.

Untuk dimensi Kelembagaan, maka perlu langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembentukan organisasi Dewan *Smart City* dimana kepala daerah atau minimal kepala OPD eselon 2 yang kompeten untuk membuat kebijakan TIK yang memimpin secara langsung pengendalian pengembangan dan pemanfaatan TIK.

2. Tim pelaksana *Smart City*
3. Tim ahli *Smart City* yang mendampingi pengelola Dinas KOMINFO
4. Memperkuat peran lembaga pengelola Dinas KOMINFO yang secara khusus dan mandiri dalam pengelolaan e-Government untuk memudahkan koordinasi dengan OPD lainnya dalam perencanaan, pengembangan, implemetasi, dan pengelolaan TIK.
5. Peningkatan kapabilitas SDM di bidang TIK baik Dinas KOMINFO maupun OPD lainnya.
6. Pengadaan dan pendistribusian SDM terkait TIK dikoorDinasikan dengan Dinas KOMINFO berdasarkan jumlah, kualifikasi, dan pendidikan.
7. Kebijakan legalitas pengelola TIK di OPD.
8. Pembentukan jenjang karir jabatan fungsional bagi SDM TIK.
9. Perlunya pendampingan untuk pengembangan pengelolaan TIK.
10. Pembentukan fungsi sistem Helpdesk terpadu dan satu pintu sehingga monitoring sistem jaringan OPD baik jaringan eksternal maupun internal dilakukan secara cepat.

Rencana pengembangan *Smart City* Magelang untuk kebijakan cukup ditetapkan dalam bentuk Perbup (Peraturan Bupati). Adapun yang perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati Magelang ditampilkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut. Dari Tabel 4.1 diturunkan dalam bentuk pelaksanaan teknis yaitu SOP.

Tabel 1. Rekomendasi Suprastruktur *Smart City* Magelang

No	Kebijakan
1	Organisasi Pengelola <i>Smart City</i> : Dewan TIK dan Tim Pelaksana TIK Pengembangan <i>Smart City</i> Magelang yang terdiri dari Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment, Ketetapan Visi dan Misi, Bentuk Organisasi, Tupoksi, Indikator keberhasilan, Tunjangan Kinerja, dan Hubungan dengan OPD / Unit Kerja.
2	Aplikasi Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment terintegrasi.
3	Infrastruktur TIK terpadu

4	Standardisasi metadata
5	Aset Informasi Daerah
6	Pemanfaatan software Legal (Open Source dan Proprietary)
7	Pemanfaatan akses Informasi
8	Keamanan Informasi dan <i>Incident handling</i>
9	Layanan Publik berbasis elektronik
10	Proses Birokrasi berbasis Elektronik / SPBE

Untuk kelembagaan, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa telah terbentuk Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Magelang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing. Dalam pemanfaatan TIK, antar OPD akan memiliki kepentingan teknis dan administrasi masing – masing, maka perlu diatur koordinasinya untuk bisa bersinergi dalam rangka memenuhi semua kebutuhan TIK.

Semua OPD selain Dinas KOMINFO merupakan pemilik data / informasi dan proses birokasinya menggunakan sarana prasarana TIK. Berikut adalah faktor – faktor yang harus dipatuhi dalam usaha transformasi proses birokrasi dan layanan publik dari manual menjadi berbasis elektronik:

1. Semua OPD harus berkoordinasi dengan Dinas KOMINFO dalam memanfaatkan sarana prasarana TIK Pemerintah Kabupaten Magelang.
2. Data, informasi, dan proses birokrasi dimiliki oleh OPD Sedangkan Dinas KOMINFO berwenang untuk sarana prasarana TIK.
3. Proses bisnis *re-engineering* yaitu melakukan inventarisasi proses birokrasi terkini yang bisa diotomatisasikan menjadi sistem informasi.

4. Pengelola data yang berfungsi untuk melakukan:
  - a. Akuisisi dan validasi data dasar
  - b. Kebijakan data / informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data melalui sistem informasi
  - c. Kebijakan pemanfaatan dan distribusi data
  - d. Pengamanan dan pemeliharaan data
  - e. Pengembangan sistem terintegrasi
  - f. Penetapan proses yang akan dijadikan modul sistem informasi
5. OPD berkoordinasi dengan tim teknis pengembangan sistem Dinas KOMINFO dalam hal:
  - a. Pengelolaan data
  - b. Proses bisnis (proses kerja sistem)
  - c. Metodologi
  - d. Platform (bahasa pemrograman, database engine, sistem aplikasi, dll)
  - e. Pelaksana
  - f. Kelayakan Anggaran
  - g. Pengelolaan sistem
  - h. Sarana dan prasarana sistem (Server, jaringan, PC terminal, dll)
  - i. Ketersediaan sistem di pasaran
6. OPD juga berkoordinasi dengan Dinas KOMINFO untuk mendapatkan ijin kelayakan tentang kebutuhan *software proprietary* dan aplikasi dari pemerintah pusat atau provinsi untuk dianalisa integrasi dengan sistem yang sudah ada.
7. OPD pemilik data dan pemilik proses birokrasi juga berkoordinasi dengan OPD lain dalam hal akuisisi data, pengelolaan dan tanggung jawab kepemilikan data / informasi / proses birokrasinya.
8. Selanjutnya untuk pemanfaatan infrastruktur TIK, dimana semua OPD berkoordinasi dengan Dinas KOMINFO untuk hal – hal berikut:
  - a. Kapasitas infrastruktur TIK yang dibutuhkan
  - b. Jumlah dan kualitas media komunikasi data
  - c. Tingkat keamanan
  - d. Sistem jaringan yang dibutuhkan
  - e. Kompatibilitas *hardware* dan *software*

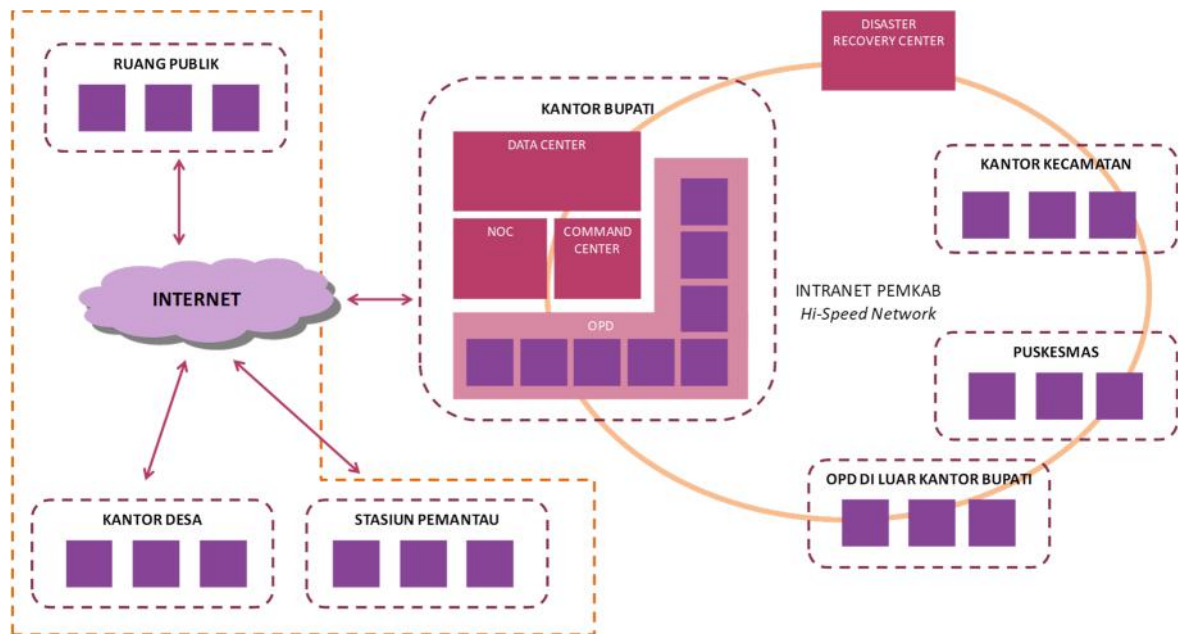
- f. Spesifikasi teknis kebutuhan pekerjaan
  - g. Mekanisme pemeliharaan, pengoperasian dan pengendaliannya
9. Semua OPD harus berkoordinasi dengan Dinas KOMINFO dalam melaksanakan pengadaan, perawatan dan pengendalian infrastruktur TIK. Hal ini bertujuan untuk efisiensi anggaran, mencegah terjadinya tumpang tindih implementasi, dan yang terpenting adalah untuk pengendalian keamanan aset informasi Pemerintah Kabupaten Magelang. Namun jika sudah ada sistem yang dibangun dari pusat untuk kepentingan nasional, maka dengan koordinasi Dinas maka sistem diatur untuk mencegah masalah teknis operasional akses informasi yang mengganggu kinerja seluruh jaringan Pemerintah Kabupaten Magelang. OPD Dinas KOMINFO yang memiliki kewenangan kebijakan untuk pengamanan seluruh sistem.

#### **4.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City***

Dalam rencana Pembangunan Infrastruktur pendukung *Smart City*, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan jaringan backbone menggunakan Fiber Optic yang menjangkau seluruh OPD & RSUD dan jaringan distribusi layanan masyarakat sampai dengan tingkat kelurahan/ puskesmas, dll.
2. Percepatan pengembangan dan pengelolaan Command Center (CC), Datacenter (NOC) dan Data recovery centre yang baik untuk menjamin availability dan peningkatan keamanan informasi.
3. Pengembangan government cloud storage.
4. Pemanfaatan Intranet (kabel dan seamless wifi) untuk komunikasi antar OPD, kecamatan / kelurahan, puskesmas, sekolah dan RSUD.
5. Adanya kebijakan standar pengelolaan infrastruktur TIK di OPD, kecamatan / kelurahan, puskesmas, sekolah dan RSUD.
6. Adanya kebijakan manajemen bandwidth, Public Internet Protocol (IP) dan pemanfaatan akses internet untuk seluruh OPD.
7. Adanya akses wifi di ruang – ruang publik.
8. Adanya infrastruktur TIK terpadu untuk monitoring dan pengelolaan kabupaten guna mewujudkan Magelang *Smart City*.

#### 4.2.1. Komponen Infrastruktur



Gambar 10. Ilustrasi komponen infrastruktur Smart City Magelang

##### 1. Data Center (Pusat Data)

Kabupaten Magelang perlu menyediakan pusat data yang dapat dimanfaatkan bersama oleh seluruh aplikasi *Smart City*. Pusat data dimaksud akan menyediakan kapasitas penyimpanan (*storage*), pemrosesan (*computing*), dan distribusi data yang dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi *Smart City*.

Pusat Data dimaksud setidaknya memiliki komponen dan perannya sebagai berikut:

- Database Server*, menyediakan kapasitas untuk penyimpanan data pokok, data transaksi, analisis dan pelaporan untuk seluruh aplikasi *Smart City*.
- Application Server*, menyediakan backend API dan Frontend bagi aplikasi *Smart City*
- File sharing server*, menyediakan solusi *cloud* untuk penyimpanan bersama arsip-arsip penting daerah

- d. *Generic hosting service*, menyediakan solusi hosting untuk aplikasi-aplikasi generik *off-the-shelf* pendukung *Smart City*.
- e. *Mail server*, menyediakan fasilitas email resmi di lingkup Pemkab Magelang.
- f. *Domain Name Server*, menyediakan layanan domain resmi untuk memudahkan pemberian alamat layanan *Smart City*.

## 2. Jaringan

Ketersediaan ini jaringan ini mutlak diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya yang dibangun melalui inisiatif *Smart City* secara optimal. Infrastruktur jaringan yang akan dibangun dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yakni: Infrastruktur Jaringan Intra OPD (Intranet Kabupaten) dan Infrastruktur Jaringan Internet Masyarakat.

### a. Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan intra pemerintah adalah jaringan komputer yang menghubungkan seluruh kantor penyelenggara pemerintahan di lingkup Pemkab Magelang pada level kabupaten dan kecamatan. Jaringan dimaksud dapat dibangun baik melalui jalur privat (baik fisik atau virtual) maupun publik (internet).

Kapasitas jaringan yang disediakan harus diproyeksikan untuk mampu menangani lalu lintas data dalam kapasitas besar, termasuk diantaranya untuk menyediakan jalur komunikasi VoIP dan Video Conference dalam lingkungan OPD di Kabupaten Magelang

### b. Jaringan Internet Masyarakat

Adalah infrastruktur jaringan internet yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan perangkat pemerintahan pada tingkat desa/kelurahan. Infrastruktur ini perlu disediakan untuk memastikan tersedianya jalur lalu lintas data hingga pada tingkatan yang terendah dengan jangkauan hingga titik-titik yang tergolong jauh dari pusat pemerintahan (*remote*). Tersedianya jalur tersebut akan memberikan manfaat antara lain:

- ) Memberikan kemudahan akses layanan bagi perangkat pemerintahan maupun masyarakat di seluruh wilayah kabupaten untuk memanfaatkan layanan pemerintah.

- ) Memungkinkan pemantauan kondisi daerah terotomasi menggunakan teknologi seperti *video surveillance*, stasiun monitoring cuaca dan iklim, monitoring kondisi lahan pertanian, hewan ternak, kondisi saluran irigasi dan lainnya (*Internet of Things*).
  - ) Mendorong munculnya inovasi pelayanan masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang diprakarsai secara mandiri oleh pemerintah setempat dalam berbagai bentuk seperti implementasi Sistem Informasi Desa, *public hotspot*, perpustakaan digital desa, rumah pintar dan lainnya.
- c. Pusat Kendali Jaringan & Data
- Infrastruktur pusat kendali jaringan dan data dibangun untuk memudahkan pemantauan kondisi operasional pusat data dan jaringan intra pemerintah untuk menjamin ketersediaan (*availability*) seluruh infrastruktur pendukung *Smart City*.
- d. Pusat Kendali Operasi (Operation Control Center)
- Infrastruktur pusat kendali operasi *Smart City* merupakan fasilitas terpusat dimana seluruh sistem *Smart City* dapat dipantau. Pusat kendali operasi dilengkapi dengan berbagai tampilan yang menyajikan informasi real-time dari perangkat dan sistem yang tersebar di seluruh magelang sehingga kondisi daerah dapat dipantau tanpa perlu menuju lokasi bersangkutan.
- e. Disaster Recovery Center
- Disaster Recovery Center (DRC) melakukan replikasi dan backup secara berkala terhadap seluruh data yang tersedia di data center. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap terjadinya kejadian force majeure yang mengakibatkan gagalnya data center menyediakan layanan seharusnya. DRC dirancang untuk mampu mengambil alih sementara peran data center hingga keadaan berhasil dipulihkan.



#### 4.2.2. Rencana Tahapan Pembangunan Infrastruktur

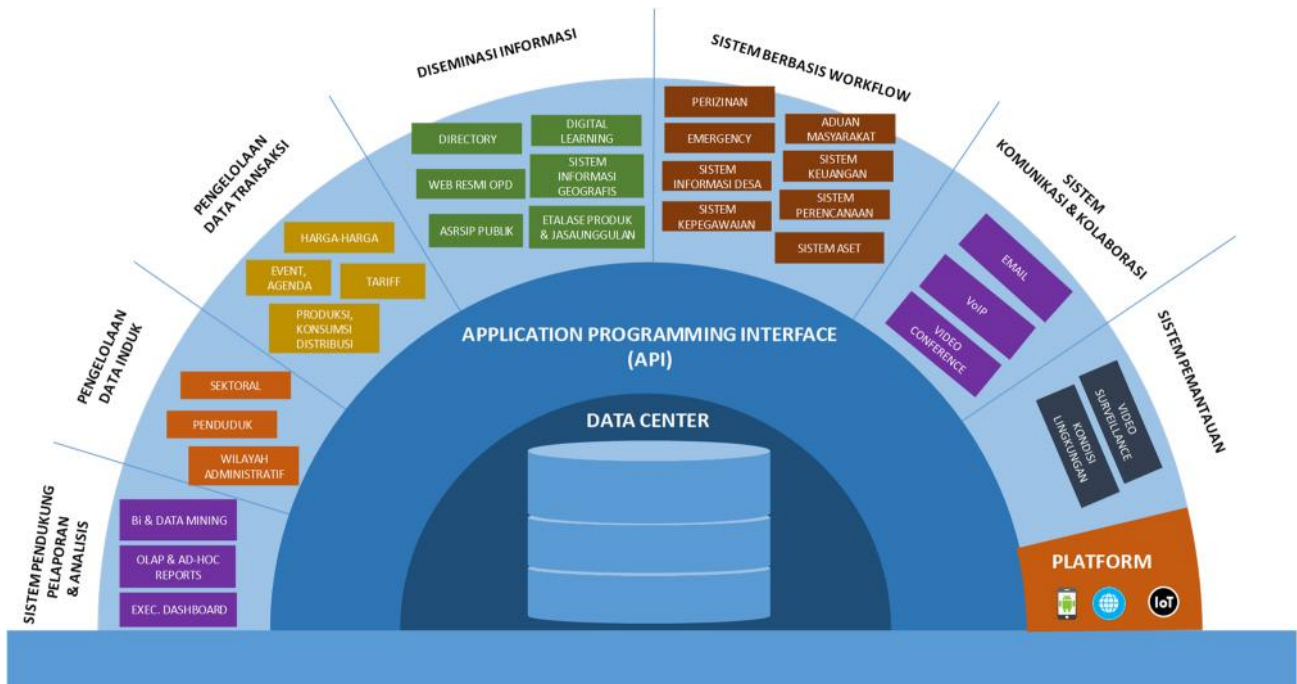
No	Komponen Infrastruktur	Sub Komponen	Indikator	Baseline
1	Data Center			
		Dedicated Internet	Bandwidth	6 Mbps
		Public IP	Total	4
		Server Cluster	Jumlah Server	2
			Agregat CPU	
			Agregat RAM	
			HDD	5 TB
		Database Server Cluster	Jumlah Server	2
			Agregat CPU	
			Agregat RAM	
			HDD	
		Generic Hosting Solution	Jumlah Server	1
			Hosting Space	2 TB
			Agregat CPU	
			Agregat RAM	
		Fileserver	Jumlah Server	1
			Disk Space	2 TB
2	Jaringan			
		Jaringan Intra OPS	Kapasitas Jaringan	
			Bandwidth Internet	
			Bandwidth minimal per OPD	
		Jaringan Internet Masyarakat	Cakupan desa dengan koneksi internet	
			Bandwidth minimal per titik	
3	Pusat Kendali Jaringan dan Data		Ketersediaan	
4	Pusat Kendali Operasional		Ketersediaan	
5	Disaster Recovery Center			

#### 4.3. Rencana Pengembangan Perangkat Lunak *Smart City*

Dalam rencana pengembangan perangkat lunak *Smart City*, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pernyataan kepemilikan, pemanfaatan data / informasi dan aplikasi e-government yang terintegrasi dalam kerangka interoperabilitas.
2. Untuk pengelolaan aset data dan informasi di Pemerintah Kabupaten Magelang, maka perlu **kebijakan sentralisasi data dan informasi** yang dihasilkan dari pemrosesan data di OPD pada datacenter Dinas KOMINFO
3. Setiap OPD memiliki sistem informasi baik untuk layanan masyarakat (G2C), dunia usaha (G2B), koorDinasi pemerintahan (G2G), maupun layanan internal (G2E), sesuai dengan prioritas kebutuhan secara bertahap, dimana pengembangan dan pengelolaannya tetap berkoordinasi dengan Dinas KOMINFO.

4. Perlunya standardisasi metadata untuk pengembangan aplikasi dan pengelolaan data tunggal dalam rangka interoperabilitas.
5. Percepatan pengembangan website OPD yang terintegrasi, dengan kemampuan melakukan interaksi dan transaksi.



Gambar 11. Kerangka arsitektur perangkat lunak *Smart City* Kab. Magelang

#### 4.3.1. Standar Arsitektur

##### 1. Penyimpanan Data

Data seluruh sistem harus disimpan pada *datacenter* secara terpusat untuk kemudahan integrasi dan pengelolaan data.

Pengecualian dapat diberikan kepada sistem-sistem khusus dengan karakter membutuhkan beban akses dan *availability* tinggi namun penggunaanya terpusat di satu lokasi, seperti Rumah Sakit dan Puskesmas. Khusus untuk sistem seperti ini, harus disediakan mekanisme sinkronisasi data dengan *datacenter*.

## 2. Akses & Keamanan Data

Akses dan pertukaran data dilakukan melalui API yang disediakan sebagai bagian dari infrastruktur datacenter. Komunikasi data harus dibangun dan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan data dan jaringan baik dari sisi *Confidentiality*, *Integrity*, *Availability* dan *Authenticity*. Setiap komunikasi sistem melalui API harus dipastikan menggunakan protokol HTTPS.

## 3. Platform Perangkat Lunak

Platform *front end* perangkat lunak *Smart City* Kabupaten Magelang disediakan dengan teknologi *web-based* dan atau *mobile based*. Penggunaan platform berbasis desktop harus ditinggalkan untuk memudahkan kemungkinan pembaharuan, perawatan dan meminimalisir biaya, kecuali untuk kasus-kasus khusus dimana penggunaan kedua platform tersebut tidak dimungkinkan.

### 4.3.2. Klasifikasi Perangkat Lunak *Smart City*

#### 1. Sistem Informasi Pengelolaan Data Induk Utama

Data induk utama kabupaten mencakup data-data utama yang menjadi rujukan lintas sektor. Karena menjadi rujukan lintas sektor, sistem informasi ini harus disediakan pada tahap awal dari rangkaian pengembangan sistem dalam inisiatif *Smart City* ini.

Data induk utama harus disusun dari *feed* basisdata yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang secara nasional, untuk menjamin kemudahan integrasi dengan sistem informasi milik pemerintah di luar Kabupaten Magelang, baik dengan memanfaatkan API yang tersedia maupun cara manual.

Termasuk dalam kelompok ini adalah:

- 1) Data induk wilayah administratif, mencakup data kecamatan, kelurahan, desa, lingkungan, RT & RW.
- 2) Data induk kependudukan berisi data dasar penduduk Kabupaten Magelang minimal mencakup NIK, dan informasi yang tertera data-data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- 3) Data induk organisasi pemerintahan, berisi data organisasi penyelenggara daerah di lingkup Kabupaten Magelang minimal

mencakup nama dan tupoksi OPD, struktur organisasi tiap-tiap OPD.

- 4) Data induk ASN, berisi data dasar seluruh ASN yang bekerja di bawah naungan Pemkab Magelang

## 2. Sistem Informasi Pengelolaan Data Induk Sektoral

Data induk sektoral mencakup data-data sektoral yang dicatat, dimutakhirkan, dan dianalisis oleh masing OPD sesuai sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Penekanan pada data sektoral ini adalah kepemilikan data ada pada OPD tertentu sehingga tanggung jawab atas pengelolaan data ada pada OPD bersangkutan namun hak akses terhadap data bersangkutan juga dimiliki oleh OPD lain yang memiliki kepentingan atas data tersebut.

Sistem ini harus didesain untuk bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan OPD secara dinamis sehingga setiap ada penambahan klasifikasi data tertentu, tidak perlu pengembangan sistem baru.

Contoh yang termasuk ke dalam klasifikasi ini antara lain:

- 1) Database Kawasan Strategis Kabupaten
- 2) Database obyek wisata
- 3) Database infrastruktur pendukung pariwisata
- 4) Database pelaku pariwisata
- 5) Database klasifikasi komoditas
- 6) Database kelompok tani
- 7) Database kelompok peternak
- 8) Database lahan pertanian dan kapasitas produksi
- 9) Database peternakan dan kapasitas produksi
- 10) Database pelaku usaha/penyedia jasa bidang pertanian, peternakan dan perikanan
- 11) Database infrastruktur pendukung pertanian, peternakan dan perikanan
- 12) Database klasifikasi produk UMKM
- 13) Database pelaku UMKM beserta jenis usaha, kapasitas usaha, beserta produk dan jasa yang ditawarkan.

- 14) Database pasar
- 15) Database tenaga kerja
- 16) Database infrastruktur jalan, jembatan
- 17) Database peruntukan kawasan
- 18) Database prasarana, sarana dan utilitas kawasan
- 19) Database ruang terbuka hijau
- 20) Database penerangan jalan umum
- 21) Database infrastruktur keairan
- 22) Database akses air bersih oleh rumah tangga
- 23) Database kawasan kumuh perkotaan
- 24) Database Rumah Tidak Layak Huni
- 25) Database infrastruktur sanitasi dan drainase
- 26) Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 27) Database produk hukum daerah
- 28) Database Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal

### 3. Sistem Informasi Pencatatan Data Rutin

Sistem ini memfasilitasi pencatatan data-data yang dicatat secara rutin(reguler). Pencatatan dapat dilakukan baik dengan cara manual (*entry* oleh petugas melalui aplikasi) atau dengan mendapatkan *feed* data secara otomatis dari sistem lain (misal: perangkat *IoT*).

Jenis data yang data dikelola di dalam sistem ini sebagian besar adalah data-data statistik sektoral, dimana tanggung jawab atas data berada pada OPD dengan bidang yang bersesuaian.

Akses terhadap pencatatan data diberikan melalui API dari data center. Pilihan mekanisme pengiriman data sesuai karakter proses bisnis di lapangan, yang sepenuhnya menjadi kewenangan OPD. Aplikasi pembantu dapat berupa aplikasi *front-end* berbasis web ataupun *mobile*.

Jenis data yang dikelola pada sistem ini harus dipahami sebagai sesuatu yang senantiasa berkembang, baik dari sisi kualitas (kedetailan data), maupun jenis data sesuai dengan kebutuhan OPD. Hal ini berarti bahwa sehingga sistem ini harus disiapkan untuk terus-menerus berkembang.

Contoh yang termasuk dalam cakupan sistem ini antara lain:

- 1) Pencatatan data kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, dan lainnya
- 2) Pencatatan data tarif dan biaya
- 3) Data agenda dan event pariwisata
- 4) Pencatatan harga pasar, baik untuk komoditas pangan, pertanian, peternakan dan lainnya
- 5) Pencatatan data produksi
- 6) Pencatatan distribusi bantuan kepada masyarakat
- 7) Pencatatan data stok dan distribusi pangan
- 8) Pencatatan data terkait cuaca, suhu, kondisi udara dan parameter lingkungan lainnya
- 9) Data agenda kerja aparat pemerintahan

#### 4. Sistem Informasi dengan Alur Kerja (Workflow) Khusus

Sistem dengan *workflow* khusus adalah sistem spesifik yang diperuntukkan untuk mendukung proses bisnis tertentu di pemerintahan. Sistem ini dibangun secara terpisah dari sistem pengelolaan maupun pencatatan data untuk mengakomodasi kekhususan dari setiap proses bisnis.

#### 5. Contoh yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain:

- 1) Sistem Layanan Pengajuan Perijinan dan Rekomendasi
- 2) Sistem Layanan Pengaduan oleh Masyarakat
- 3) Sistem Layanan Darurat
- 4) Sistem Layanan Pengaduan oleh ASN
- 5) Sistem Pencatat Kehadiran Guru dan ASN
- 6) Sistem Pengelolaan Aset Daerah
- 7) Sistem Kepegawaian Daerah
- 8) Sistem Perencanaan Daerah
- 9) Sistem Keuangan Daerah
- 10) Sistem Informasi Desa

## 6. Sistem Pendukung Diseminasi Informasi

Sistem pendukung diseminasi informasi adalah sistem-sistem yang dibangun untuk memberikan informasi tertentu yang bersifat untuk konsumsi publik. Informasi yang disampaikan pada sistem ini dapat merupakan agregasi dari data yang telah disimpan pada sistem pengelolaan data induk, sektoral, dan pencatatan data rutin.

Berbagai bentuk dari sistem ini antara lain:

- 1) Website resmi masing-masing OPD
- 2) Direktori data sektoral (misal: direktori UMKM, direktori pariwisata, direktori pertanian, dsb.)
- 3) Sistem Informasi Geografis (Peta Kawasan Strategis, Peta Wisata, Peta Infrastruktur, dsb.)
- 4) Etalase Komoditas dan Produk Unggulan
- 5) Pusat arsip publik
- 6) Perpustakaan digital daerah
- 7) Sistem manajemen pengetahuan bagi aparat pemerintahan
- 8) Pusat pembelajaran digital bagi masyarakat

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses seluruh informasi yang tersedia, diperlukan sebuah “pintu masuk” khusus, baik dalam bentuk Web Portal maupun Mobile Apps yang didalamnya berisi tautan (*links*) maupun ringkasan dan agregat informasi dari seluruh sistem yang ada dalam klasifikasi ini.

## 7. Sistem Pendukung Pelaporan dan Analisis

Sistem pendukung laporan dan analisis adalah sistem informasi untuk jajaran manajerial, yang menyajikan kemampuan agregasi dan analisis data dari seluruh data yang tersimpan pada data center.

Termasuk ke dalam sistem ini antara lain:

- 1) Dashboard Executive
- 2) Online Analytical Processing (OLAP)

3) Business Intelligence

4) Data Mining

#### 8. Sistem Pendukung Komunikasi & Kolaborasi

Termasuk ke dalam kategori ini adalah sistem yang digunakan untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi baik di internal jajaran pemerintah kabupaten maupun dengan publik yakni:

1) Fasilitas email resmi OPD

2) VoIP dan Video Conference

3) Akun resmi media sosial

#### 9. Sistem Monitoring

Sistem monitoring yang dimaksud adalah sistem-sistem yang dibangun untuk melakukan pemantauan otomatis terhadap kondisi-kondisi yang perlu dipantau baik secara real-time maupun berkala.

Termasuk ke dalam sistem ini adalah:

1) Sistem monitoring fasilitas publik (CCTV)

2) Sistem monitoring lalu lintas

3) Sistem monitoring indikator kebencanaan

4) Sistem monitoring indikator lingkungan

#### 4.3.3. Tahapan pengembangan

##### 1. Prioritas Pengembangan

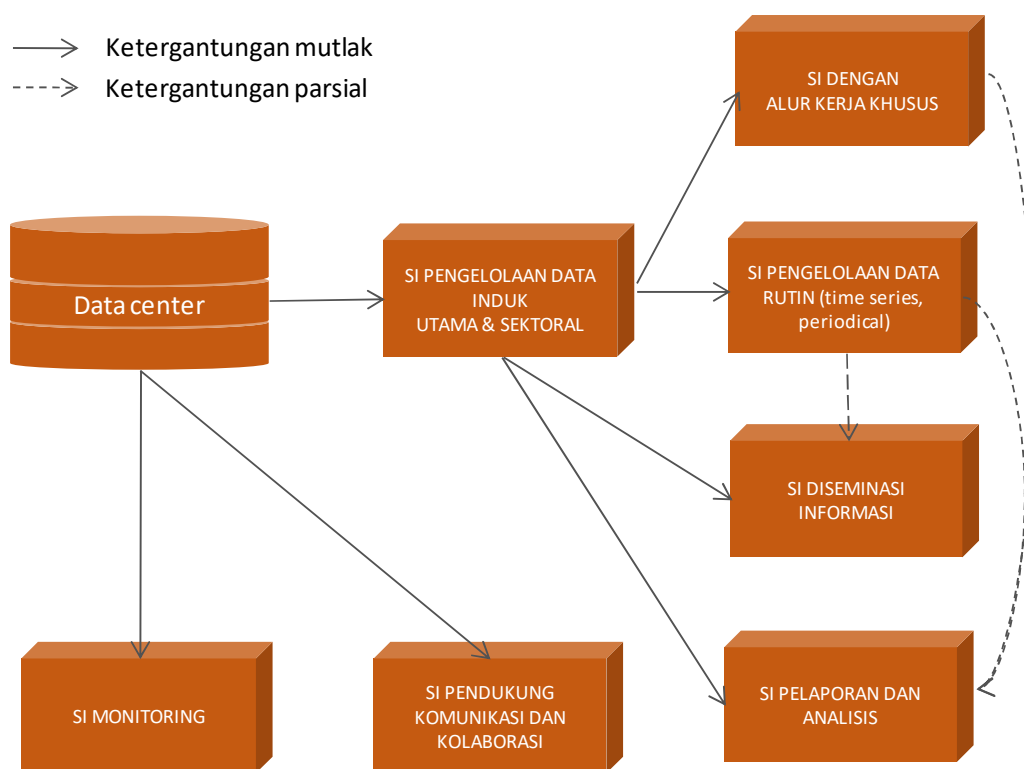
Prioritas pengembangan perangkat lunak *Smart City* disusun dengan memperhatikan setidaknya dua faktor yakni pola ketergantungan antar sistem dan prioritas pengembangan yang merujuk kepada Kawasan Strategis Kabupaten.

##### 2. Pola Ketergantungan antar Sistem

Perangkat lunak *Smart City* tidak berdiri sendiri-sendiri. Terdapat perangkat lunak yang memiliki ketergantungan terhadap keberadaan infrastruktur



tertentu dan perangkat lunak lain, terutama dari sisi ketersediaan data. Secara garis besar ketergantungan tersebut dapat disajikan dalam diagram berikut.



02

Ketergantungan mutlak menggambarkan bahwa sistem yang menjadi pendahulu (predecessor, pangkal panah) mutlak harus sudah ada sebelum sistem yang membutuhkan (successor, ujung panah). Sebagai contoh, pengembangan sistem untuk diseminasi informasi beserta sistem untuk pelaporan dan analisis dapat dimulai setelah data induk utama dan sektoral yang bersesuaian selesai dikerjakan. Seiring pengembangan, data-data dari hasil pencatatan data rutin juga dapat dimasukkan ke dalam sistem.

#### 4.4. Rencana Penguatan Literasi *Smart City*

Selain literasi melalui Website <http://magelangkab.go.id>, penguatan literasi *Smart City* dilaksanakan paralel dengan penguatan komponen *Smart City* lainnya, seperti penguatan infrastruktur dan suprastruktur. Penguatan literasi dilaksanakan

berkesinambungan melalui bimtek, focus group discussion, sosialisasi, dan seminar tentang *Smart City*. Bimtek, focus group discussion, sosialisasi, dan seminar dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang terkait. Semua pengembangan aplikasi dan layanan publik online memerlukan sosialisasi dan focus group discussion pada awal pengembangan, saat uji coba, dan saat implementasi. Selanjutnya dilakukan bimtek penggunaan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, dan pengamanan aplikasi. Bimtek, focus group discussion, sosialisasi, dan seminar tentang perkembangan teknologi, trouble shooting sistem, etika profesi, etika penyebaran dan penggunaan informasi. Untuk itu Dinas KOMINFO Kabupaten magelang memastikan adanya dokumentasi seperti manual book, SOP, dan buku petunjuk.

## BAB V

### PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY*

1. Tahun pertama dan tahun kedua difokuskan pada pemantapan kebijakan, regulasi, dokumen pengembangan pengelolaan TIK, dan kelembagaan. Sehingga di tahun ke tiga hingga akhir tahun ke lima hanya perlu melakukan review, revisi minor, dan penambahan SOP seperlunya. Sedangkan untuk rekrutmen dan pengelolaan SDM lebih mengikuti prosedur umum yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
2. **Tiga tahun pertama dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 akan dilakukan penguatan dan pemantapan infrastruktur** hingga tercapai kondisi ideal untuk terjaminnya Bussiness Continuity Plan. Selama lima tahun selalu dilaksanakan pemeliharaan dan penggantian perangkat yang sudah waktunya diganti berdasarkan umur efektif dan tingkat kerusakannya.
3. Demikian juga dengan pengembangan Infostruktur (aplikasi), dimana pada tiga tahun pertama akan dilakukan pemantapan dan pematangan interoperabilitas sistem informasi dan aplikasi, arsitektur sistem terintegrasi, database terpadu, bisnis proses reengineering pada seluruh birokrasi, sosialisasi dan penyelenggaraan pilot project. Selanjutnya 2 tahun berikutnya dilakukan kegiatan pengembangan sistem terintegrasi secara masif yang melibatkan seluruh OPD

## 5.1. Sinkronisasi Program Smart City dengan Program RPJMD

**Tabel 1. Strategi Pembangunan *Smart City* pada Elemen Smart Governance**

NO	KODE RPJMD	SINKRONISASI PROGRAM RPJMD	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA KEGIATAN SMART CITY	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PEMRAKARSA	PENGEMBANG	PENGGUNA	KERJA SAMA	TAHUN
1	2.6.2.6.1.1.16	Program pelayanan Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Penerbitan Perubahan Identitas Penduduk	Jumlah Dokumen Penduduk	Pelayanan Adminduk Online	Memberikan pelayanan pelayanan adminduk yang cepat, mudah, murah, ramah dan tepat	Pelayanan Adminduk semakin cepat	Disdukcapil	Diskominfo	Masyarakat	Diskominfo	2019 - 2024
2	2.6.2.6.1.1.15	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Tersedianya Informasi Data Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	Tersajinya data kependudukan yang dapat dipergunakan oleh berbagai pihak	Data kependudukan diakses oleh berbagai pihak	DISDUKCAPIL	Diskominfo	MASYARAKAT	Diskominfo	2019 - 2024
3	4.1.4.1.3.1.33	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum (1)	Jumlah kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	e-PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	Mempercepat pelayanan administrasi dan perijinan di Kecamatan	Terwujudnya e-PATEN di seluruh kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan	Diskominfo	Kecamatan	Diskominfo, Kecamatan	2019 - 2024

4	2.7.2.7.1.1.2.2	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	Fasilitasi pengisian data informasi desa	Jumlah data informasi desa yang dimutakhirkan	Sistem Informasi Desa, a.l.: - Kependudukan, - Asset desa, - Pengelolaan keuangan desa, - Data kemiskinan, - Bumdes, - Teknologi tepat guna, - Inovasi desa, - Posyandu, - Data pertanian, perikanan, peternakan, - Sumber daya alam, - Data pemerintahan dan demografi desa (dikembangkan secara bertahap & pilot project)	Pemutakhiran data desa	Terwujudnya profil desa	DISPERMADES	DISKOMINFO	DESA, SEMUA SKPD DAN MASYARAKAT	Operator SID di desa, DISKOMINFO	2019 - 2024
5	4.3.4.3.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	Integrasi e-Musrenbang, e-Planning, e-budgeting dan e-Monev	Memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan hingga monitoring pelaksanaan	Prosentase usulan kegiatan yang terekam dan konsisten dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban	Bappeda dan Litbangda	DISKOMINFO	SEMUA SKPD	Semua SKPD	2019 - 2024
6	4.7.4.3.1.1.15	Program penelitian dan pengkajian daerah	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Sosial dan Budaya	Jumlah aplikasi penelitian dan pengembangan yang terbangun	e-PIKIR (Pengembangan, Inovasi, Krenova, IDSD dan Riset)	Memudahkan pengelolaan hasil riset, fasilitasi kepada peneliti dan memperkuat input perencanaan, Pengembangan, Inovasi, Krenova dan IDSD.	Jumlah Pengembangan, Inovasi, Krenova, IDSD dan Riset yang difasilitasi	Bappeda dan Litbangda	DISKOMINFO	OPD, Perguruan Tinggi, swasta dan masyarakat	OPD, Perguruan Tinggi, swasta dan masyarakat	2020 - 2024

7	4.4.4.4.5.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya (5)	Jumlah aplikasi pendukung SmartCity	Aplikasi Pelayanan Bidang Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (SIMPAD, ePBB Online, SP2D Online, BPHTB Online, e Budgeting, SIBATA, SIM Aset)	1. Memberikan Pelayanan Bidang Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang efektif dan efisien 2. Memberikan Data dan Informasi Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1. Jumlah aplikasi pendukung Smart City 2. Jumlah pengguna data informasi Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	BPPKAD	Dinas Kominfo	Stakeholder dan SKPD	SKPD terkait dan Diskominfo	2019 - 2024
8	2.12.2.12.1.1.20	Program pelayanan perijinan	Fasilitasi operasional pelayanan perijinan	Jenis ijin (Non OSS) yang masuk dalam SiPrima	SiPrima (Sistem Informasi Perijinan Kabupaten Magelang)	Meningkatkan iklim investasi yang baik, dengan sistem perijinan yang cepat	Jenis ijin (Non OSS) yang masuk dalam SiPrima	DPMPTSP	DISKOMINFO	MASYARAKAT, SKPD Terkait	SKPD terkait	2019 - 2024
9	2.10.2.10.1.1.21	Program pengelolaan aplikasi informatika	Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD	Jumlah Aplikasi SKPD dan Desa yang terfasilitasi	Sistem Informasi Eksekutif	Memberikan informasi yang realtime kepada kepala daerah untuk membantu menganalisa dan mengambil kebijakan	Jumlah informasi realtime untuk mempercepat proses pengambilan keputusan	DISKOMINFO	DISKOMINFO	BUPATI DAN SEMUA SKPD	SKPD terkait	2019 - 2024
10	2.10.2.10.1.1.21	Program pengelolaan aplikasi informatika	Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD	Jumlah Aplikasi SKPD dan Desa yang terfasilitasi	Aplikasi AmongRaSa (Aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa)	Menyajikan data administrasi pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan secara menyeluruh, terpadu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya	Tersedianya data AmongRaSa di seluruh desa/ kelurahan	DISKOMINFO	DISKOMINFO	Desa/ Kelurahan , Masyarakat	Kecamatan, Desa/ Kelurahan	2019 - 2024

11	4.1.4.1.3.2.37	Program Pengembangan Kelembagaan, Tata Laksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	Pengembangan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan Perangkat Daerah yang disusun	Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Memudahkan dalam proses distribusi surat dan pengambilan kebijakan	Perbup TNDE	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	BUPATI DAN SEMUA SKPD	SKPD terkait	2020 - 2024
	2.10.2.10.1.1.19	Program Persandian	Pengelolaan Persandian dan Telekomunikasi	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah			Prosentase jenis surat yang sudah masuk dalam TNDE	Bagian Organisasi	DISKOMINFO			
12	4.2.4.2.1.1.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah tindak lanjut LHP yang ditangani	SIMWAS (Sistem Informasi Pengawasan)	Memudahkan Pengendalian dan Informasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan	Prosentase tindak lanjut yang diselesaikan	INSPEKTORAT	DISKOMINFO	BUPATI	SKPD terkait	2019 - 2024
13	4.1.4.1.3.3.32	Program Penataan Peraturan Perundangundangan dan bantuan hukum	Pengelolaan JDIH	Jumlah dokumen hukum yang dikelola	JDIH	Memberikan pelayanan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat	Dokumen dan informasi hukum dapat tersaji dengan lengkap, akurat, mudah dan cepat	Bagian Hukum	Diskominfo	Masyarakat dan Aparatur	Diskominfo	2019 - 2024

14			Penanganan permasalahan hukum dan harmonisasi konsep kesepakatan bersama dan/ perjanjian kerjasama	Jumlah permasalahan hukum Litigasi dan Non Litigasi yang ditangani	<i>Online Legal Consultation</i>	Untuk meningkatkan pelayanan konsultasi permasalahan hukum perangkat daerah, ASN dan masyarakat	Terselenggaranya pelayanan konsultasi permasalahan hukum	Bagian Hukum	Diskominfo	Masyarakat dan Aparatur	Aparat penegak hukum	2019 - 2024
15	4.1.4.1.3.5.36	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan (3)	Pelaporan administrasi pembangunan yang tersusun : 1. Laporan APBD	Pengembangan aplikasi SIMONEVA dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat	Menyediakan data capaian kinerja sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan	1. Persentase jumlah laporan monev yang di input pada aplikasi SIMONEVA 2. Tersedianya layanan informasi SIMONEVA bagi masyarakat	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Kominfo, semua OPD	2019 - 2024
16	3.6.2.11.1.1.22	Program pembinaan dan penataan pasar	Pengelolaan Pendapatan pasar	Jumlah pasar yang dikelola pendapatannya	Pembangunan sistem Monev pendapatan pasar secara real time dengan kartu elektronik	Meningkatkan pendapatan retribusi pasar	Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan system Monev pendapatan pasar	DISDAGKOP UKM	DISDAGKOP UKM	PELAKU USAHA PASAR	SKPD terkait	2019 - 2024
17	3.6.2.11.1.1.23	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolagian	Fasilitasi Penilaian Metrologi	Ketersediaan sistem Informasi Metrologi legal	SIM Metrologi Legal	Meningkatkan peran unit metrologi legal	Jumlah UTTP yang bisa memanfaatkan SIM Metrologi Legal	DISDAGKOP UKM	DISKOMINFO	UTTP	SKPD terkait, UTTP	2019 - 2024



18	4.1.4.1.3.7.40	Program kehumasan dan Layanan Keprotokolan	Analisis Pemberitaan, naskah pidato, dan dokumentasi	1 Aplikasi : Sistem Informasi Analisis Pemberitaan (SIAP)	Sistem Informasi Analisis Pemberitaan (SIAP)	Jenis/ macam berita yang dianalisa dan langkah-langkah kebijakan yang bisa diambil	Prosentase berita positif	Bagian Humas dan Protokol	DISKOMINFO	Bagian Humas dan Protokol	SKPD terkait	2020 - 2024
19	2.9.2.9.1.1.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Cakupan pelayanan uji kendaraan bermotor, pengadaan mobil uji keliling.	Pengujian kendaraan bermotor sistem drive thru	a. mempercepat pelayanan pada konsumen berupa pelayanan sistem drive thru f. menginformasikan/ mengingatkan kepada pemilik kendaraan bahwa KBWU (kendaraan bermotor wajib uji)sudah habis masa uji dan meminta untuk uji ulang melalui sms gateway g. data kendaraan dapat dilihat melalui pembacaan barcode	Jumlah kendaraan wajib uji yang teruji menggunakan sistem drive thru	DISHUB	DISKOMINFO	MASYARAKAT	SKPD terkait	2021 - 2024
20	1.2.1.2.1.1.25	Peningkatan sarana dan prasarana RS dan Puskesmas	Pengembangan e Government DKK	Terlaksananya e-government bidang kesehatan di Kabupaten Magelang	Pengembangan e-Government Kesehatan Terpadu	Mendapatkan informasi secara terpadu tentang data kesehatan	Jumlah jenis informasi kesehatan terpadu yang dapat disediakan	DINKES	DISKOMINFO	MASYARAKAT	Rumah Sakit, Puskesmas	2019 - 2024
21	4.1.4.1.3.2.37	Program Pengembangan Kelembagaan, Tata Laksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perjanjian kinerja yang tersusun 2. Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang terpublikasi	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	Masyarakat dan SKPD	Seluruh SKPD	2019 - 2024

22	3.7.2.1.1.1.20	Program Pengembangan Industri	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil	jumlah dokumen data IKM yang update	Sistem Informasi Database Katalog Industri Kecil Menengah (SIDAK IKM)	Tersedianya data Industri Kecil Menengah yang update	jumlah dokumen data IKM yang update	DISPERINNAKER	DISKOMINFO	IKM dan stakeholder	SKPD Terkait	2019 - 2024
23	2.1.2.1.1.1.18	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kegiatan Penguatan Sarana Dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan	Kios three in one yang terbentuk	Kios Three in One (Pelatihan,Lowongan Kerja dan Sertifikasi)	Terbentuknya konsolidasi antara pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja	Kios three in one yang terbentuk	DISPERINNAKER	DISPERINNAKER	Tenaga Kerja	SKPD Terkait	2019 - 2024
24	2.1.2.1.1.1.18	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pelayanan ketenagakerjaan yang ter ISO	Peningkatan Pelayanan Ketenagakerjaan Terstandarisasi ISO	Terbentuknya sistem pelayanan ketenagakerjaan yang tersertifikasi ISO	Jumlah pelayanan ketenagakerjaan yang ter ISO	DISPERINNAKER	DISPERINNAKER	Tenaga Kerja	SKPD Terkait	2019 - 2024
25	3.1.3.1.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	SIM Peternakan dan Perikanan	Menyediakan informasi peternakan dan perikanan	Tersedianya SIM Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan, SKPD terkait	SKPD terkait	2019 - 2024

Tabel 2. Strategi Pembangunan *Smart City* pada Elemen Smart Branding

NO	KODE RPJMD	SINKRONISASI PROGRAM RPJMD	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA KEGIATAN SMART CITY	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PEMRAKARSA	PENGEMBANG	PENGGUNA	KERJA SAMA	TAHUN
1	3.2.2.13.1.1.19	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemasaran dan promosi Pariwisata	Jumlah branding pariwisata yang tersusun dan tersosialisasi	Penyusunan branding Kabupaten Magelang (KRENOVA BRANDING)	Sarana promosi wisata untuk meningkatkan pengunjung dan menambah lama tinggal	1. Jumlah peserta yang mengikuti sayembara branding kab magelang 2. Branding yang terpilih lewat sayembara	DISPARPORA	BAPPEDA & LITBANGDA	PEMKAB MAGELANG	Budayawan, praktisi, SKPD terkait, masyarakat, pelaku usaha industry, perbankan (sebagai sponsor)	2020
2					Sosialisasi Branding terpilih secara manual dan virtual menggunakan media sosial		1. Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi branding masyarakat 2. Jumlah konten (jam tayang) branding yang ditayangkan secara virtual dengan menggunakan media sosial	DISPARPORA			Budayawan, praktisi, SKPD terkait, masyarakat, pelaku usaha industry, perbankan (sebagai sponsor)	2021

3	3.2.2.13.1.1.18	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata	1. Jumlah SDM Pokdarwis yang terfasilitasi 2. Jumlah usaha pariwisata yang terbina	Gerakan Pembangunan Kelompok Sadar Wisata (BANGUN POKDARWIS)	Meningkatkan keterampilan pelaku usaha pariwisata	1. Jumlah SDM Pokdarwis yang terlatih 2. Jumlah usaha pariwisata yang terbina	DISPARPORA	DISPARPORA	DISPARPORA	Budayawan, praktisi, SKPD terkait, masyarakat, pelaku usaha industry, perbankan (sebagai sponsor)	2019 - 2024
4	3.2.2.13.1.1.18	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	1. Jumlah Desa Wisata yang terbangun	Gerakan Pembangunan Desa Wisata (BANGUN DEWI)	Merupakan usaha untuk meningkatkan potensi desa menjadi desa wisata dengan pemberdayaan masyarakat	1. Jumlah Desa Wisata	DISPARPORA	DISPARPORA	DISPARPORA	Budayawan, praktisi, SKPD terkait, masyarakat, pelaku usaha industry, perbankan (sebagai sponsor)	2020 - 2024
5	3.2.2.13.1.1.19	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemasaran dan promosi pariwisata	Jumlah Aplikasi Wisata yang diupdate/dikembangkan	Aplikasi Pesona Magelang	pengembangan aplikasi Pesona Magelang untuk menambahkan menu informasi perkiraan biaya wisata yang dibutuhkan, informasi amenities, informasi transportasi local. Mendukung Promosi wisata magelang	1. Jumlah konten yang ditambahkan kedalam aplikasi pesona magelang 2. Persentasi masyarakat yang mengakses aplikasi pesona mangelang	Disparpora	DISKOMINFO	Masyarakat	Pelaku wisata, SKPD terkait	2020

6				Jumlah Penyelenggaraan Informasi Tourist Information Center (TIC)	Penyelenggaraan Informasi Tourist Information Center (TIC)	Menyediakan pusat informasi pariwisata yang menyediakan fasilitas peta digital	1. Jumlah Pengunjung TIC 2. Jumlah Konten Informasi Yang disediakan	Disparpora	Disparpora	Masyarakat	Pelaku wisata, SKPD terkait	2020 - 2024
7	2.10.2.10.1.1.21	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan ekosistem TIK	Jumlah desa yang potensinya terupdate dalam aplikasi Jelajah Magelang	Sistem Panduan Lokasi (" <i>Jelajah Magelang</i> ")	Merupakan alat berbasis IT untuk menjelajah ke semua lokasi yang ada di Kabupaten Magelang sampai ke pelosok desa melalui perangkat gadget, Sistem panduan lokasi berbasis android untuk menemukan dan menuju tempat yang dicari, mengenalkan potensi ekonomi secara luas, dengan tujuan 1. Terbentuknya database lokasi potensi daerah yang terintegrasi dan dikategorikan kedalam 16 kategori 2. Memberikan akses informasi kepada masyarakat melalui satu aplikasi mobile ( <i>one klik</i> ) 3. sebagai sarana promosi potensi bagi desa	1. Persentase jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi Jelajah Magelang 2. Jumlah desa yang sudah menginput data dan informasi kedalam aplikasi Jelajah Magelang 3. Jumlah log dan intensitas entry data pada aplikasi Jelajah Magelang 4. Jumlah konten yang diintegrasikan kedalam aplikasi Jelajah Magelang	DISKOMINFO	DISKOMINFO	MASYARAKAT	Pemerintah Desa	2019 - 2024

8	3.3.2.3.1.1.27	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan	Jumlah Sertifikasi Organik Padi	Magelang Go-Organik	Meningkatkan daya saing produk pertanian	Peningkatan luas areal yang tersertifikasi organik	Distanpangan	Distanpangan	Distanpangan dan Petani	Distanpangan, Petani, dan Lembaga Sertifikasi Organik Nasional	2019 - 2024
			Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Jumlah Sertifikasi Organik Sayuran dan Tanaman Obat								
			Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Penyegar	Jumlah Sertifikasi Organik Kopi								
			Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Tahunan dan Rempah	Jumlah Sertifikasi Organik Kelapa								

Tabel 3. Strategi Pembangunan *Smart City* pada Elemen Smart Economy

NO	KODE RPJMD	SINKRONISASI PROGRAM RPJMD	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA KEGIATAN SMART CITY	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PEMRAKARSA	PENGEMBANG	PENGGUNA	KERJA SAMA	TAHUN
1	2.10.2.10.1.1.21	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan ekosistem TIK	Jumlah Komoditas Unggulan yang terfasilitasi dalam Pasar Gemilang	Pasar Gemilang	Memasarkan Produk Unggulan Kabupaten Magelang Secara Komprehensif	1. Peningkatan Omzet Usaha 2. Meningkatnya transaksi hasil produk UMKM yang notabene meningkatkan taraf ekonomi masyarakat 3. Peningkatan kuantitas pedagang produk pertanian 4. tersedianya data IKM kab Magelang dan produk unggulan 5. publik bisa mendapatkan data industri dengan mudah 6. Jumlah data jejaring stakeholder peternakan dan perikanan dari hulu sampai hilir; 7. Jumlah data jejaring stakeholder pengolah dan pembudidaya ikan dari hulu sampai hilir ; 8. tersedianya data IKM kab Magelang dan produk unggulan	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Pemkab Magelang dan Masyarakat	Dinas Kominfo	2021 - 2024
2	3.3.2.3.1.1.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Pembiayaan Pertanian	Jumlah asuransi usaha tani	Asuransi Usaha Tani	Menurunkan resiko gagal panen petani sawah	Jumlah peserta asuransi	Distanpangan	Distanpangan	Petani sawah	Distan Provinsi, Lembaga asuransi	2020 - 2024

3	3.3.2.3.1.1.29	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi dan siaran radio	BPP Online, Pranatamangsa Online	Meningkatkan kinerja pelayanan penyuluhan pertanian	Meningkatnya petani/ poktan/ gapoktan yang memanfaatkan informasi dari BPP online dan Pranatamangsa online	Distanpangan	Distanpangan, UKSW	Pemkab Magelang dan masyarakat	Diskominfo, UKSW	2020 - 2024
---	----------------	--	--	--	----------------------------------	---	--	--------------	--------------------	--------------------------------	------------------	-------------



Tabel 4. Strategi Pembangunan *Smart City* pada Elemen Smart Living

NO	KODE RPJMD	SINKRONISASI PROGRAM RPJMD	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA KEGIATAN SMART CITY	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PEMRAKARSA	PENGEMBANG	PENGGUNA	KERJA SAMA	TAHUN
1	1.3.1.3.1.1.36	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Jalan	1. Penyediaan dan Pengelolaan Data atau Informasi Jalan 2. Penyediaan dan Pengelolaan Data atau Informasi Pelengkap Jalan	Jumlah Dokumen Tersusun	Sistem Informasi Jalan dan Pelengkap Jalan (e-Jalan)	Menginformasikan kepada masyarakat tentang peta jalan dan jembatan, drainase, trotoar, talud jalan, kondisi fisik, status jalan sekaligus memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan kondisi jalan-jalan yang rusak	1. Jumlah data jalan dan bangunan pelengkap jalan yang di input dalam aplikasi 2. jumlah laporan masyarakat tentang kondisi jalan dan bangunan pelengkap jalan rusak yang melalui aplikasi e-Jalan. 3. Jumlah aduan jalan dan bangunan pelengkap jalan rusak dari masyarakat yang ditindak lanjuti oleh DPUPR	DPUPR	DISKOMINFO (Aplikasi)	DPUPR, SKPD Terkait, Masyarakat	DPUPR, SKPD Terkait	2019 - 2024
2	1.3.1.3.1.1.37	Program Peningkatan Layanan Sumber Daya Air dan Jalan Irigasi	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah data pemetaan D.I yang akurat tentang jaringan irigasi	Sistem Informasi Irigasi Berbasis GIS	Memberikan informasi jaringan irigasi berbasis GIS	Terwujudnya sistem informasi jaringan irigasi berbasis GIS	DPUPR	DISKOMINFO (Aplikasi)	DPUPR, SKPD Terkait, Masyarakat	DPUPR, SKPD Terkait	2019 - 2024
3	1.2.1.2.1.1.16	Program Pelayanan Kesehatan	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksananya SPGDT Kabupaten Magelang	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Mengurangi tingkat kematian dan kecacatan karena kejadian gawat darurat	Jumlah kematian dan kecacatan karena kejadian gawat darurat	DINKES	DINKES	PUSKESMAS, Masyarakat	Rumah Sakit, Puskemas, PMI	2019 - 2024

4	2.9.2.9.1.1.23	Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	Pengelolaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	Terwujudnya Smart PJJ	Pembangunan Smart Perlengkapan Jalan	Memberikan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan yang dikendalikan teknologi informasi	Terwujudnya efisiensi (pengurangan) penggunaan perlengkapan jalan dan coveragenya	DISHUB	DISHUB, Diskominfo	Pengguna Jalan	DISHUB	2020 - 2024
5			Pemeliharaan dan pengadaan sarana perlengkapan jalan	Terwujudnya Sistem ITS	Pembangunan ITS (Intelligent Transportation System) kab Magelang	Pembangunan sistem ITS	Terwujudnya sistem ITS	DISHUB	DISHUB	Pengguna Jalan	DISHUB, SKPD terkait	2019 - 2024
6	2.9.2.9.1.1.17	Program pelayanan peningkatan angkutan	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Meningkatnya kecepatan pelayanan	Sistem Informasi Pelayanan Uji Kendaraan (SIM PUK-SMART)	Mempercepat waktu proses pelayanan uji kendaraan	Waktu pelayanan lebih cepat	DISHUB	DISHUB	Masyarakat	DISHUB, SKPD terkait	2019 - 2024
7	1.2.1.2.2.1.35	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS	SIMRS	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat	Tersedianya Aplikasi SIMRS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan, SKPD terkait	Masyarakat, SKPD terkait	SKPD terkait	2019 - 2024

Tabel 5. Strategi Pembangunan *Smart City* pada Elemen Smart Society

NO	KODE RPJMD	SINKRONISASI PROGRAM RPJMD	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA KEGIATAN SMART CITY	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PEMRAKARSA	PENGEMBANG	PENGUNA	KERJA SAMA	TAHUN
1	1.5.1.5.1.1.25	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pengelolaan Data Berbasis SIG (25.3)	Jumlah Laporan Data Trantibum	Sistem Informasi Satpol PP dan PK berbasis GIS	Menyediakan informasi realtime tentang kejadian gangguan ketertiban umum dan ketentraman wilayah	Jumlah data pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman secara cepat berbasis GIS	Satpol PP & PK	Diskominfo	Masyarakat	Polres dan SKPD terkait	2019 - 2024
2	1.5.1.5.1.1.27	Program Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah SKKL dan Desa Siaga Kebakaran yang terbentuk	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan dan Desa Siaga Kebakaran	Meningkatkan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran secara Mandiri	Jumlah SKKL dan Desa Siaga Kebakaran yang terbentuk	Satpol PP & PK	Satpol PP & PK	Masyarakat	Masyarakat	2019 - 2024

3	1.1.1.1.1.1.23	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitas PPDB SD (23.38)	Jumlah SD Negeri yang terfasilitasi	PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) Online SD	Memberikan informasi yang cepat dan akurat terhadap PPDB dalam daerah	Persentase siswa didik SD yang mendaftar lewat aplikasi PPDB	Disdikbud	Diskominfo	Masyarakat	Diskominfo, sekolah SD	2020 - 2024
4	1.1.1.1.1.1.24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitas PPDB SMP (24.65)	Jumlah Sekolah yang melaksanakan PPDB Online	PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) Online SMP	Memberikan informasi yang cepat dan akurat terhadap PPDB dalam daerah	Persentase siswa didik SMP yang mendaftar lewat aplikasi PPDB	Disdikbud	Diskominfo	Masyarakat	Diskominfo, sekolah SMP	2019 - 2024
5	1.5.1.6.2.1.23	Program Penanggulangan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi (23.2)	Jumlah pembentukan desa bersaudara dan jumlah pengembangan desa bersaudara	PASESO (Paseduluran Deso) Merapi	Menemukan desa saudara saat di pengungsian bencana	Terbentuk desa bersaudara untuk saling membantu saat terjadi bencana	BPBD	BPBD	Masyarakat	Pemerintah Desa	2019 - 2024

6	1.5.1.6.2.1.23	Program Penanggulangan Bencana	Mitigasi Bencana (23.1)	Jumlah Pemantauan Daerah Rawan Bencana, Penyebarluasan Informasi dan Rakor 12. Jumlah LEWS	Peningkatan Upaya peringatan Dini/LEWS (Land Early Warning System)	Mengurangi resiko bencana dari inisiatif masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengakses LEWS untuk meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat terhadap bencana	BPBD	BPBD	Masyarakat	Pemerintah desa dan masyarakat	2019 - 2024
7	1.5.1.6.2.1.23	Program Penanggulangan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi (23.2)	Jumlah Pembentukan Destana	Pengembangan desa tangguh bencana	Menyiapkan kesiapan dan ketangguhan masyarakat desa dalam menghadapi bencana	Jumlah desa yang memiliki masyarakat desa yang tangguh dalam menghadapi bencana	BPBD	BPBD	Masyarakat	Pemerintah desa dan masyarakat	2019 - 2024
8	1.5.1.6.2.1.24	Program Penanggulangan Bencana	Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Lokasi TEA dan Daerah Rawan Bencana	Pembangunan/ rehab tempat evakuasi akhir (SISTER VILLAGE)	Menyediakan fasilitas pengungsian di daerah aman pada saat darurat bencana	Jumlah fasilitas pengungsian yang tersedia di daerah aman jika terjadi darurat bencana	BPBD	BPBD	Masyarakat	Desa aman	2019 - 2024

9	1.1.1.1.1.1.24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (24.70)	Kesesuaian antara hasil akreditasi dengan layanan pendidikan	Surveillance Akreditasi Sekolah untuk memberikan kepastian mutu layanan pendidikan	Menjaga kualitas layanan pendidikan	Jumlah sekolah yang memperbarui akreditasinya	Disdikbud	Diskominfo	Masyarakat	Dewan Pendidikan, Unit Pelaksana Akreditasi	2020 - 2024
10	1.1.1.1.1.1.25	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C	Jumlah tutor yang mengikuti pelatihan e learning	e-Learning untuk menyajikan materi pembelajaran secara online	Memudahkan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar	1. Jumlah digital book (materi pembelajaran) yang di install di computer sekolah 2. Jumlah kelas yang melaksanakan e learning	Disdikbud	Diskominfo	Tutor dan Siswa	Guru, Sekolah, dinas perpustakaan, diskominfo	2020 - 2024
11	2.10.2.10.1.1.23	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Diseminasi Informasi melalui Media Massa (23.2)	1. Jumlah Portal Berita Daerah BeritaMagelang.id 2. Jumlah layanan pengaduan pemerintah kabupaten magelang	BeritaMagelang.id Lapor.go.id	Untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap hasil kinerja pemda kab Magelang	Jumlah informasi yang dikemas dalam bentuk virtual	Diskominfo	Diskominfo	Masyarakat	Seluruh OPD	2020 - 2024
12	2.10.2.10.1.1.23	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diseminasi informasi melalui media publik (23.3)	1. Jumlah penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan melalui media interpersonal atau wahana komunikasi masyarakat	Smart Media Center	Untuk meningkatkan literasi TIK layak anak teradap masyarakat	1. Jumlah kegiatan wahana komunikasi masyarakat 2. Persentase jumlah masyarakat yang menghadiri dan mendapatkan literasi TIK	Diskominfo	Diskominfo	Masyarakat	Dinsos	2019 - 2024

13	2.10.2.10.1.1.21	Program pengelolaan aplikasi informatika	Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD	Jumlah Aplikasi SKPD dan Desa yang terfasilitasi	SiYap (Sistem Layanan Cepat Tanggap)	Membantu dan mempermudah dalam penanganan layanan kedaruratan untuk saat ini yang sudah tersedia antara lain kebencanaan (BPBD) dan kebakaran (DAMKAR)	Tersedianya kanal pelaporan kedaruratan	DISKOMINFO	DISKOMINFO	Masyarakat	BPBD, Damkar	2019 - 2024
14	4.1.4.1.3.6.34	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Pengembangan dan Pengelolaan Islamic Center (34.4)	Pengelolaan Islamic Center	Pembangunan Islamic Center	Menyediakan pusat kegiatan keagamaan islam di kabupaten Magelang	Tersedianya tempat untuk kegiatan keagamaan Islam	Kesra	DPU	Masyarakat	Kemenag, MUI, Baznas, IPHI, NU, Muhammadiyah	2019 - 2024
15	2.8.1.6.1.1.26	Pembangunan Ketahanan Keluarga	Advokasi dan KIE Kampung KB bagi SKPD, Sosialisasi bagi Pokja Tingkat Kabupaten, Perencanaan dan Evaluasi Kampung KB	Jumlah kampung KB yang terbentuk dan terevaluasi	Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) memberikan pelatihan bagi masyarakat untuk Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Meningkatkan kesejahteraan pada dusun/ kampung dengan melihat data dasar yang selalu diupdate	Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga di masyarakat	Dinsos PPKB PPPA	Dinsos PPKB PPPA	Masyarakat	SKPD terkait	2019 - 2024

16			Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	1. Jumlah data keluarga tervalidasi 2. Jumlah IMP dan ILKP yang mendapatkan sosialisasi UKP 3. Jumlah IMP yang melaksanakan program KBPK di desa	Penyusunan rumah data sosial	Melatih kader untuk selalu melakukan validasi dan updating data	Data keluarga selalu divalidasi	Dinsos PPKB PPPA,	Dinsos PPKB PPPA	Masyarakat	kominfo, dukcapil, PPKBD (pembantu penyuluh KB Desa) dan sub PPKBD	2020 - 2024
----	--	--	--	--	------------------------------	---	---------------------------------	-------------------	------------------	------------	--	-------------



17	2.2.1.6.1.1.20	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Percepatan Pencapaian Menuju Kabupaten Layak Anak	1. Jumlah Desa Ramah Anak 2. Jumlah anak yang menjadi peserta forum anak tingkat desa dan kecamatan 3. Jumlah kampung anak yang terbentuk	Kampung Anak Sejahtera. Kampung Anak Sejahtera (KAS) merupakan pengentasan kekurangan gizi pada anak. Bentuk kegiatan : pembentukan relawan KAS yang bertugas memantau proses Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan memonitoring kesehatan anak. Pelatihan bagi orang tua tentang pemahaman pola asuh dan gizi, serta pemberian motivasi bagi orang tua agar terampil dalam memenuhi kebutuhan gizi	1. Menurunkan jumlah anak yang kekurangan gizi 2. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak	1. Jumlah relawan KAS 2. Jumlah orang tua yang mengikuti pelatihan pola asuh dan pelatihan tentang gizi 3. Jumlah kegiatan pelatihan dan motivasi bagi orang tua 4. Jumlah desa ramah anak 5. Jumlah Forum Anak 6. Tingkat peringkat Kabupaten Layak Anak	DINSOS PPKB PPA	DINSOS PPKB PPA	Masyarakat	Dinkes, Puskesmas, Relawan KAS	2019 - 2024
----	----------------	---	---	---	--	--	--	-----------------	-----------------	------------	--------------------------------	-------------

18	1.6.1.1.1.23	Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Jumlah KPM PKH yang terfasilitasi dalam program keluarga harapan 2. Jumlah PMKS yang terfasilitasi dalam pengajuan bansos terencana 3. Jumlah proposal yang terverifikasi 4. Jumlah korban bencana yang terfasilitasi penanganan korban bencana 5. Jumlah call center yang terbentuk	Call center 112 - kekerasan dan gelandangan	PMKS dapat segera ditangani dengan cepat, tidak lagi melalui telepon perorangan	Masyarakat dapat mengakses call center	DINSOS PPKB PPA	DINSOS PPKB PPA (Tata Kelola), DISKOMINFO (Perangkat Call Center)	Masyarakat	Diskominfo, Satpol PP, UGDJ, Rumah Singgah, amongputro	2021 - 2024
----	--------------	--	---------------------------------	---	---	---	--	-----------------	---	------------	--	-------------

19	2.17.2.17.1.1.17	Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Pelayanan Perpustakaan	1. Jumlah pengunjung 2. Jumlah Perpustakaan yang menggunakan aplikasi perpustakaan terintegrasi	PUSPA GEMILANG	Masyarakat dapat mengakses fasilitas perpustakaan dari mana dan kapan saja melalui smartphone dan komputer	1. Meningkatkan jumlah pengunjung 2. Memudahkan layanan perpustakaan terintegrasi	DISPUSPA	DISPUSPA	Masyarakat	Perpustakaan Sekolah dan Desa/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat/ Komunitas	2019 - 2024
----	------------------	---	------------------------	--	----------------	--	--	----------	----------	------------	---	-------------

Tabel 6. Strategi Pembangunan *Smart City* pada Elemen Smart Environment

NO	KODE RPJMD	SINKRONISASI PROGRAM RPJMD	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA KEGIATAN SMART CITY	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PEMRAKARSA	PENGEMBANG	PENGUNGA	KERJA SAMA	TAHUN
1	1.4.1.4.1.1.25	Program pengembangan dan peningkatan kualitas perumahan	Perencanaan Perumahan	Terbangunnya Sistem Informasi Database RTLH	Sistem Informasi Database RTLH (SIM PKP)	Memudahkan dalam proses pengusulan peningkatan rumah tidak layak huni dan pemutahiran data perumahan melalui sistem informasi	Terwujudnya sistem informasi perumahan	DPRKP	DISKOMINFO (Aplikasi)	DPRKP, Masyarakat	Disdukcapil, Diskominfo, Bappeda dan Litbangda, Setda, BPPKAD, DPMPTSP, DLH, Dispermades	2019 - 2024
2	1.4.1.4.1.1.23	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyediaan PSU Permukiman	Terbangunnya Sistem Informasi Penyediaan Layanan Pemakaman Umum	Sistem Informasi Layanan Pemakaman Umum (SIM PKP)	Memudahkan proses pendaftaran, pencatatan dan penyediaan sarana pemakaman umum bagi warga masyarakat Kabupaten Magelang	Terwujudnya sistem informasi layanan pemakaman umum	DPRKP	DISKOMINFO (Aplikasi)	Masyarakat, Dinsos PPKBPPPA, Disdukcapil, DPRKP	Disdukcapil, Diskominfo, Bappeda dan Litbangda, BPPKAD, DPMPTSP, DLH, Dispermades, Dinsos PPKBPPPA	2024

3	1.4.1.4.1.1.23	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyediaan PSU Permukiman	Terbangunnya Sistem Informasi PSU Permukiman	Sistem Informasi PSU Permukiman (SIM PKP)	Memudahkan proses pemetaan, perencanaan, pelaporan, penanganan aduan dan pemutakhiran data PSU permukiman yang terintegrasi melalui sistem informasi	Terwujudnya sistem informasi PSU Permukiman	DPRKP	DISKOMINFO (Aplikasi)	Masyarakat, DPRKP, DPUPR, Bagian Admin Bangda, Bappeda dan Litbangda	DPUPR, Bagian Admin Bangda, Bappeda dan Litbangda	2022 - 2024
4	2.5.2.5.1.1.30	Program peningkatan kapasitas tata lingkungan hidup	Pengkajian dan pengembangan informasi lingkungan hidup	Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem dan Informasi Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Komunikasi Lingkungan Hidup (SIKOLING)	Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup	Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Lingkungan	Dinas LH	DISKOMINFO (Aplikasi)	Masyarakat	Kominfo, Pelaku Industri yang mengujka. Uji kualitas air dan udara,	2020 - 2024

5	2.5.2.5.1.1.31	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah	1. Jumlah sosialisasi 2. Jumlah bank sampah dan TPS3R yang dibina 3. Jumlah bank sampah dan TPS3R yang diberi penghargaan 4. Jumlah lomba bank sampah dan TPS3R yang dilaksanakan 5. Jumlah bantuan pengelolaan sarpras untuk bank sampah dan TPS3R 6. Pembentukan bank sampah kantor dan sekolah 7. Gerakan pungut sampah 8. Publikasi pengurangan sampah 9. Sistem Informasi Pengurangan Sampah	Pengurangan Sampah Berbasis Komunitas	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah	1. Presentase pengurangan sampah 2. Tersedianya sistem informasi pengurangan sampah	Dinas LH	Dinas LH	Masyarakat	Masyarakat, pelapak sampah	2019 - 2024
---	----------------	--	---	---	---------------------------------------	--	--	----------	----------	------------	----------------------------	-------------

6	2.5.2.5.1.1.31	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	1. Jumlah TPSS yang direvitalisasi dan dibangun2. Jumlah TPST yang dibangun3. Sistem Informasi Penanganan Sampah	Penanganan Sampah	Optimalisasi Penanganan Sampah	1. Jumlah TPSS yang direvitalisasi dan dibangun2. Jumlah TPST yang dibangun3. Sistem Informasi Penanganan Sampah	Dinas LH	Dinas LH	Masyarakat	Masyarakat	2019 - 2024
---	----------------	--	---	--	-------------------	--------------------------------	--	----------	----------	------------	------------	-------------

7	2.5.2.5.1.1.33	Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Konservasi Kawasan Resapan Air	1. Jumlah orang yang disosialisasi 2. Luas lahan yang dikonservasi 3. Jumlah komunitas pelestari mata air yang dibentuk (komunitas jogo tuk) 4. Lahan sumber mata air yang dibeli pemerintah 5. Jumlah pohon aren yang diselamatkan 6. Tersedianya sistem informasi sumber mata air	Gerakan Pelestarian Sumber Mata Air Berbasis Ekonomi Masyarakat (GERTAS MABAS)	Melalui pelestarian dan penanaman berbagai macam tumbuhan yang mampu meningkatkan debit air sekaligus hasil panennya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	1. Jumlah orang yang disosialisasi 2. Luas lahan yang dikonservasi 3. Jumlah komunitas pelestari mata air yang dibentuk (komunitas jogo tuk) 4. Lahan sumber mata air yang dibeli pemerintah 5. Jumlah pohon aren yang diselamatkan 6. Tersedianya sistem informasi sumber mata air	Dinas LH	Dinas LH	Masyarakat	Masyarakat Tani, penyedia bibit tanaman yang menahan debit air	2019 - 2024
---	----------------	---	--------------------------------	--	--	--	--	----------	----------	------------	--	-------------



	2.5.2.5.1.1.29	Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	1. Pengelolaan sistem layanan laboratorium lingkungan terakreditasi	Layanan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Terakreditasi	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan laboratorium lingkungan terakreditasi	1. Pengelolaan sistem layanan laboratorium lingkungan terakreditasi	Dinas LH	Dinas LH	Personil Laboratorium dan Masyarakat	Masyarakat, Komite Akreditasi Nasional	2019 - 2024
--	----------------	---	---	---	---	--	---	----------	----------	--------------------------------------	--	-------------

## 5.2. Peta Jalan *Smart City* Kabupaten Magelang

Tabel 2. Peta Jalan *Smart City* Kabupaten Magelang

NO	KODE RPJMD	SINKRONISASI PROGRAM RPJMD	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN SMART CITY	TAHUN						KETERANGAN
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
SMART GOVERNANCE											
1	2.6.2.6.1.1.16	Program pelayanan Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Penerbitan Perubahan Identitas Penduduk	Pelayanan Adminduk Online	Penyiapan Internal	Pelaksanaan Layanan Adminduk Online	Pelaksanaan Layanan Adminduk Online	Pelaksanaan Layanan Adminduk Online	Pelaksanaan Layanan Adminduk Online	Pelaksanaan Layanan Adminduk Online	Disdukcapil
2	2.6.2.6.1.1.15	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengeloaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Penyajian Data Kependudukan	Penyiapan Internal	Pembangunan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	DISDUKCAPIL

3	4.1.4.1.3.1.33	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum (1)	e-PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	Pembangunan Aplikasi, Monev Pelaksanaan PATEN di 21 Kecamatan	Pengelolaan Aplikasi, Monev Pelaksanaan PATEN di 21 Kecamatan	Pengelolaan Aplikasi, Monev Pelaksanaan PATEN di 21 Kecamatan	Pengelolaan Aplikasi, Monev Pelaksanaan PATEN di 21 Kecamatan	Pengelolaan Aplikasi, Monev Pelaksanaan PATEN di 21 Kecamatan	Pengelolaan Aplikasi, Monev Pelaksanaan PATEN di 21 Kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan
4	2.7.2.7.1.1.2.2	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	Fasilitasi pengisian data informasi desa	Sistem Informasi Desa, a.l: - Kependudukan, - Asset desa, - Pengelolaan keuangan desa, - Data kemiskinan, - Bumdes, - Teknologi tepat guna, - Inovasi desa, - Posyandu, - Data pertanian, perikanan, peternakan, - Sumber daya alam, - Data pemerintahan dan demografi desa (dikembangkan secara bertahap & pilot project)	60 informasi desa tersusun	70 informasi desa tersusun	70 informasi desa tersusun	70 informasi desa tersusun	70 informasi desa tersusun	70 informasi desa tersusun	DISPERMADES

Master Plan *Smart City* Kabupaten Magelang

5	4.3.4.3.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Integrasi e-Musrenbang, e-Planning, e-budgeting dan e-Monev	1 pengembangan SIPPD Modul VI dan Modul VII	1 pengembangan SIPPD Modul VIII dan IX	1 pengembangan SIPPD Modul X dan XI	1 pengembangan SIPPD Modul XII dan XIII	1 pengembangan SIPPD Modul XIV dan XV	1 pengembangan SIPPD Modul XVI dan XVII	Bappeda dan Litbangda
6	4.7.4.3.1.1.15	Program penelitian dan pengkajian daerah	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Sosial dan Budaya	e-PIKIR (Pengembangan, Inovasi, Krenova, IDSD dan Riset)		1 pembangunan aplikasi e-PIKIR	1 pengembangan aplikasi e-PIKIR	1 pengembangan aplikasi e-PIKIR	1 pengembangan aplikasi e-PIKIR	1 pengembangan aplikasi e-PIKIR	Bappeda dan Litbangda
7	4.4.4.4.5.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya (5)	Aplikasi Pelayanan Bidang Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (SIMPAD, ePBB Online, SP2D Online, BPHTB Online, e Budgeting, SIBATA, SIM Aset)	Pengelolaan 7 Aplikasi	Pengelolaan 8 Aplikasi	Pengelolaan 8 Aplikasi	Pengelolaan 8 Aplikasi	Pengelolaan 8 Aplikasi	Pengelolaan 8 Aplikasi	BPPKAD
8	2.12.2.12.1.1.20	Program pelayanan perijinan	Fasilitasi operasional pelayanan perijinan	SiPrima (Sistem Informasi Perijinan Kabupaten Magelang)	Pengembangan Aplikasi (Penambahan Jenis Ijin)	Pengembangan Aplikasi (Penambahan Jenis Ijin)	Pengembangan Aplikasi (Penambahan Jenis Ijin)	Pengembangan Aplikasi (Penambahan Jenis Ijin)	Pengembangan Aplikasi (Penambahan Jenis Ijin)	Pengembangan Aplikasi (Penambahan Jenis Ijin)	DPMPSTP
9	2.10.2.10.1.1.21	Program pengelolaan aplikasi informatika	Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD	Sistem Informasi Eksekutif	Pengembangan Sistem	Pengembangan Sistem	Pengembangan Sistem	Pengembangan Sistem	Pengembangan Sistem	Pengembangan Sistem	DISKOMINFO

10	2.10.2.10.1.1.21	Program pengelolaan aplikasi informatika	Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD	Aplikasi AmongRaSa (Aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa)	Sosialisasi, Pembangunan Aplikasi, Pelatihan, Entry Data oleh Desa/ Kelurahan	Updating data/ pengelolaan	Updating data/ pengelolaan	Updating data/ pengelolaan	Updating data/ pengelolaan	Updating data/ pengelolaan	DISKOMINFO
11	4.1.4.1.3.2.37	Program Pengembangan Kelembagaan, Tata Laksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	Pengembangan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)		1 dokumen Perbup TNDE					Bagian Organisasi
	2.10.2.10.1.1.19	Program Persandian	Pengelolaan Persandian dan Telekomunikasi			60 SKPD	60 SKPD	60 SKPD	60 SKPD	60 SKPD	Bagian Organisasi
12	4.2.4.2.1.1.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	SIMWAS (Sistem Informasi Pengawasan)	Penambahan Fitur pada Aplikasi SIMWAS, Prosentase tindak lanjut yang terselesaikan 85,5%	Penerapan Aplikasi SIMWAS dan Pengembangan Aplikasi SIMWAS, Prosentase tindak lanjut yang terselesaikan 86%	Penerapan Aplikasi SIMWAS dan Pengembangan Aplikasi SIMWAS, Prosentase tindak lanjut yang terselesaikan 87%	Penerapan Aplikasi SIMWAS dan Pengembangan Aplikasi SIMWAS, Prosentase tindak lanjut yang terselesaikan 88%	Penerapan Aplikasi SIMWAS dan Pengembangan Aplikasi SIMWAS, Prosentase tindak lanjut yang terselesaikan 89%	Penerapan Aplikasi SIMWAS dan Pengembangan Aplikasi SIMWAS, Prosentase tindak lanjut yang terselesaikan 90%	INSPEKTORAT
13	4.1.4.1.3.3.32	Program Penataan Peraturan Perundangundangan dan bantuan hukum	Pengelolaan JDIH	JDIH	Integrasi dengan JDIHN, perluasan platform android	Pengelolaan dan pengembangan	Pengelolaan dan pengembangan	Pengelolaan dan pengembangan	Pengelolaan dan pengembangan	Pengelolaan dan pengembangan	Bagian Hukum

Master Plan *Smart City* Kabupaten Magelang

14			Penanganan permasalahan hukum dan harmonisasi konsep kesepakatan bersama dan/ perjanjian kerjasama	<i>Online Legal Consultation</i>	Pembangunan Aplikasi Klinik Hukum Online, Launching Klinik Hukum Online	Pengelolaan Klinik Hukum Online	Pengelolaan Klinik Hukum Online	Pengelolaan Klinik Hukum Online	Pengelolaan Klinik Hukum Online	Pengelolaan Klinik Hukum Online	Bagian Hukum
15	4.1.4.1.3.5.36	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan (3)	Pengembangan aplikasi SIMONEVA dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat	Pengembangan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	Bagian Administrasi Pembangunan
16	3.6.2.11.1.1.2 2	Program pembinaan dan penataan pasar	Pengelolaan Pendapatan pasar	Pembangunan sistem Monev pendapatan pasar secara real time dengan kartu elektronik	Persiapan Stakeholder terkait	Ujicoba 1 pasar termonitor pendapatannya secara real time	1 pasar termonitor pendapatannya secara real time	1 pasar termonitor pendapatannya secara real time	1 pasar termonitor pendapatannya secara real time	1 pasar termonitor pendapatannya secara real time	DISDAGKOP UKM
17	3.6.2.11.1.1.2 3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolagian	Fasilitasi Penilaian Metrologi	SIM Metrologi Legal	Pembangunan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	DISDAGKOP UKM
18	4.1.4.1.3.7.40	Program kehumasan dan Layanan Keprotokolan	Analisis Pemberitaan, naskah pidato, dan dokumentasi	Sistem Informasi Analisis Pemberitaan (SIAP)		Pembangunan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Bagian Humas dan Protokol
19	2.9.2.9.1.1.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Pengujian kendaraan bermotor sistem drive thru			Pembangunan 1 Sistem Layanan Drive Thru	Pengelolaan 1 Sistem Layanan Drive Thru	Pengelolaan 1 Sistem Layanan Drive Thru	Pengelolaan 1 Sistem Layanan Drive Thru	DISHUB

Master Plan *Smart City* Kabupaten Magelang

20	1.2.1.2.1.1.25	Peningkatan sarana dan prasarana RS dan Puskesmas	Pengembangan e Government DKK	Pengembangan e-Government Kesehatan Terpadu	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	DINKES
21	4.1.4.1.3.2.37	Program Pengembangan Kelembagaan, Tata Laksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 dokumen SAKIP	2 dokumen SAKIP	2 dokumen SAKIP	2 dokumen SAKIP	2 dokumen SAKIP	2 dokumen SAKIP	Bagian Organisasi
22	3.7.2.1.1.1.20	Program Pengembangan Industri	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil	Sistem Informasi Database Katalog Industri Kecil Menengah (SIDAK IKM)	Penyusunan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	DISPERINNAKER
23	2.1.2.1.1.1.18	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kegiatan Penguatan Sarana Dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan	Kios Three in One (Pelatihan, Lowongan Kerja dan Sertifikasi)	Persiapan Penyusunan Kios Three in One	Persiapan Penyusunan Kios Three in One	Pengelolaan Kios Three in One	Pengelolaan Kios Three in One	Pengelolaan Kios Three in One	Pengelolaan Kios Three in One	DISPERINNAKER
24	2.1.2.1.1.1.18	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan Pelayanan Ketenagakerjaan Terstandarisasi ISO	Penyusunan Persiapan ISO, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	Pengelolaan Aplikasi, Layanan Tersedia	DISPERINNAKER

25	3.1.3.1.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	SIM Peternakan dan Perikanan	Pembangunan SIM	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	DISPETERIKAN
<b>SMART BRANDING</b>											
1	3.2.2.13.1.1.1.9	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemasaran dan promosi Pariwisata	Penyusunan branding Kabupaten Magelang (KRENOVA BRANDING)		1 kegiatan sayembara					DISPARPORA
2				Sosialisasi Branding terpilih secara manual dan virtual menggunakan media sosial			Sosialisasi Branding 3 kali				DISPARPORA
3	3.2.2.13.1.1.1.8	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata	Gerakan Pembangunan Kelompok Sadar Wisata (BANGUN POKDARWIS)	75 orang	33 orang	38 orang	43 orang	48 orang	53 orang	DISPARPORA
4	3.2.2.13.1.1.1.8	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Gerakan Pembangunan Desa Wisata (BANGUN DEWI)		5 desa wisata	5 desa wisata	5 desa wisata	5 desa wisata	5 desa wisata	DISPARPORA



5	3.2.2.13.1.1.1.1.9	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemasaran dan promosi pariwisata	Aplikasi Pesona Magelang		1 Aplikasi, 3 informasi (informasi perkiraan biaya wisata yg dibutuhkan, informasi amenitas dan informasi transportasi lokal.)					Disparpora
6				Penyelenggaraan Informasi Tourist Information Center (TIC)		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Disparpora
7	2.10.2.10.1.1.21	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan ekosistem TIK	Sistem Panduan Lokasi (" <i>Jelajah Magelang</i> ")	Launching Jelajah Magelang, Pelatihan Operator Desa, Pengembangan Aplikasi, Updating Data	Pelatihan Operator Desa, Pengembangan Aplikasi, Updating Data	Pelatihan Operator Desa, Pengembangan Aplikasi, Updating Data	Pelatihan Operator Desa, Pengembangan Aplikasi, Updating Data	Pelatihan Operator Desa, Pengembangan Aplikasi, Updating Data	Pelatihan Operator Desa, Pengembangan Aplikasi, Updating Data	DISKOMINFO
8	3.3.2.3.1.1.27	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan	Magelang Go-Organik	958,25 Ha	25 Ha	25 Ha	25 Ha	25 Ha	25 Ha	Distanpangan
			Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat		51,85 Ha	3 Ha	3 Ha	3 Ha	3 Ha	3 Ha	
			Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Penyegar		114,7 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha	

			Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Tahunan dan Rempah		87,41 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha	
<b>SMART ECONOMY</b>											
1	2.10.2.10.1.1.21	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan ekosistem TIK	Pasar Gemilang			Pembangunan Aplikasi	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi	Dinas Kominfo
2	3.3.2.3.1.1.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Pembiayaan Pertanian	Asuransi Usaha Tani		Asuransi 2.500 hektar lahan	Asuransi 2.500 hektar lahan	Asuransi 2.500 hektar lahan	Asuransi 2.500 hektar lahan	Asuransi 2.500 hektar lahan	Distanpangan
3	3.3.2.3.1.1.29	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian	BPP Online, Pranatamangsa Online		22 paket publikasi dan siaran radio	22 paket publikasi dan siaran radio	22 paket publikasi dan siaran radio	22 paket publikasi dan siaran radio	22 paket publikasi dan siaran radio	Distanpangan
<b>SMART LIVING</b>											
1	1.3.1.3.1.1.36	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Jalan	1. Penyediaan dan Pengelolaan Data atau Informasi Jalan2. Penyediaan dan Pengelolaan Data atau Informasi Pelengkap Jalan	Sistem Informasi Jalan dan Pelengkap Jalan (e-Jalan)	Pembangunan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi	DPUPR

Master Plan *Smart City* Kabupaten Magelang

2	1.3.1.3.1.1.37	Program Peningkatan Layanan Sumber Daya Air dan Jalan Irigasi	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Sistem Informasi Irigasi Berbasis GIS	Pengelolaan Aplikasi, Digitasi Data Spasial	Pengelolaan Aplikasi, Digitasi Data Spasial	Pengelolaan Aplikasi, Digitasi Data Spasial	Pengelolaan Aplikasi, Digitasi Data Spasial	Pengelolaan Aplikasi, Digitasi Data Spasial	Pengelolaan Aplikasi, Digitasi Data Spasial	DPUPR
3	1.2.1.2.1.1.16	Program Pelayanan Kesehatan	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	DINKES
4	2.9.2.9.1.1.23	Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	Pengelolaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	Pembangunan Smart Perlengkapan Jalan		Pendataan Perlengkapan Jalan	Pembangunan Sistem Aplikasi Smart Perlengkapan Jalan	Pengelolaan Sistem Aplikasi Smart Perlengkapan Jalan	Pengelolaan Sistem Aplikasi Smart Perlengkapan Jalan	Pengelolaan Sistem Aplikasi Smart Perlengkapan Jalan	DISHUB
5			Pemeliharaan dan pengadaan sarana perlengkapan jalan	Pembangunan ITS (Intelligent Transportation System) kab Magelang	DED	Master Plan dan 3 ITS	5 ITS	5 ITS	5 ITS	5 ITS	DISHUB
6	2.9.2.9.1.1.17	Program pelayanan peningkatan angkutan	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Sistem Informasi Pelayanan Uji Kendaraan (SIM PUK-SMART)	Pembangunan SIM PUK-SMART	Pengelolaan SIM PUK-SMART	Pengelolaan SIM PUK-SMART	Pengelolaan SIM PUK-SMART	Pengelolaan SIM PUK-SMART	Pengelolaan SIM PUK-SMART	DISHUB

7	1.2.1.2.2.1.35	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	SIMRS	penyusunan aplikasi pendaftaran on line	implementasi pendaftaran on line dan penyusunan aplikasi pelaporan data RM	penyusunan aplikasi E - RM RJ	penyusunan E- RM RI	penyusunan E- RM IGD	pengembangan aplikasi data logistik	RSUD Muntilan
<b>SMART SOCIETY</b>											
1	1.5.1.5.1.1.25	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pengelolaan Data Berbasis SIG (25.3)	Sistem Informasi Satpol PP dan PK berbasis GIS	Pengelolaan Data Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Berbasis SIG, 12 Laporan	Pengelolaan Data Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Berbasis SIG, 12 Laporan	Pengelolaan Data Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Berbasis SIG, 12 Laporan	Pengelolaan Data Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Berbasis SIG, 12 Laporan	Pengelolaan Data Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Berbasis SIG, 12 Laporan	Pengelolaan Data Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Berbasis SIG, 12 Laporan	Satpol PP & PK
2	1.5.1.5.1.1.27	Program Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Penanggulangan Kebakaran	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan dan Desa Siaga Kebakaran	Sosialisasi	Terbentuk 1 SKKL dan 1 Desa Siaga Kebakaran	Terbentuk 1 SKKL dan 1 Desa Siaga Kebakaran	Terbentuk 1 SKKL dan 1 Desa Siaga Kebakaran	Terbentuk 1 SKKL dan 1 Desa Siaga Kebakaran	Terbentuk 1 SKKL dan 1 Desa Siaga Kebakaran	Satpol PP & PK
3	1.1.1.1.1.1.23	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi PPDB SD (23.38)	PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) Online SD		Sosialisasi PPDB Online SD	Pelaksanaan PPDB Online SD	Pelaksanaan PPDB Online SD	Pelaksanaan PPDB Online SD	Pelaksanaan PPDB Online SD	Disdikbud

4	1.1.1.1.1.1.24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi PPDB SMP (24.65)	PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) Online SMP	Pembangunan Aplikasi PPDB Online, Pelaksanaan PPDB Online SMP Negeri	Pengembangan Aplikasi, Pelaksanaan PPDB Online SMP Negeri	Pengembangan Aplikasi, Pelaksanaan PPDB Online SMP Negeri	Pengembangan Aplikasi, Pelaksanaan PPDB Online SMP Negeri	Pengembangan Aplikasi, Pelaksanaan PPDB Online SMP Negeri	Pengembangan Aplikasi, Pelaksanaan PPDB Online SMP Negeri	Disdikbud
5	1.5.1.6.2.1.23	Program Penanggulangan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi (23.2)	PASESO (Paseduluran Deso) Merapi	Pembentukan Desa Bersaudara di KRB III (1 Desa di Magelang 1 Desa di Boyolali)	Pembentukan Desa Bersaudara di KRB II, Pengembangan Desa Bersaudara yang sudah terbentuk	Pembentukan Desa Bersaudara di KRB II, Pengembangan Desa Bersaudara yang sudah terbentuk	Pembentukan Desa Bersaudara di KRB II, Pengembangan Desa Bersaudara yang sudah terbentuk	Pembentukan Desa Bersaudara di KRB II, Pengembangan Desa Bersaudara yang sudah terbentuk	Pembentukan Desa Bersaudara di KRB II, Pengembangan Desa Bersaudara yang sudah terbentuk	BPBD
6	1.5.1.6.2.1.23	Program Penanggulangan Bencana	Mitigasi Bencana (23.1)	Peningkatan Upaya peringatan Dini/LEWS (Land Early Warning System)	Pemasangan Alat LEWS 5 Unit oleh Pemda, Pengembangan LEWS sederhana oleh desa	Pemasangan Alat LEWS 5 Unit oleh Pemda, Pengembangan LEWS sederhana oleh desa	Pemasangan Alat LEWS 5 Unit oleh Pemda, Pengembangan LEWS sederhana oleh desa	Pemasangan Alat LEWS 5 Unit oleh Pemda, Pengembangan LEWS sederhana oleh desa	Pemasangan Alat LEWS 5 Unit oleh Pemda, Pengembangan LEWS sederhana oleh desa	Pemasangan Alat LEWS 5 Unit oleh Pemda, Pengembangan LEWS sederhana oleh desa	BPBD
7	1.5.1.6.2.1.23	Program Penanggulangan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi (23.2)	Pengembangan desa tangguh bencana	Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan 5 Desa Tangguh Bencana	Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan 5 Desa Tangguh Bencana	Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan 5 Desa Tangguh Bencana	Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan 5 Desa Tangguh Bencana	Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan 5 Desa Tangguh Bencana	Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan 5 Desa Tangguh Bencana	BPBD
8	1.5.1.6.2.1.24	Program Penanggulangan Bencana	Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pembangunan/rehab tempat evakuasi akhir (SISTER VILLAGE)	Membangun 11 unit TEA sesuai DED	Penyusunan DED TEA	Membangun 10 unit TEA sesuai DED	Penyusunan DED TEA	Membangun 10 unit TEA sesuai DED	Penyusunan DED TEA	BPBD

9	1.1.1.1.1.1.24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (24.70)	Surveillance Akreditasi Sekolah untuk memberikan kepastian mutu layanan pendidikan		visitasi ke 26 sekolah untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil akreditasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti serta audit 2 standar Pendidikan	visitasi ke 26 sekolah untuk memastikan rekomendasi hasil surveillant sebelumnya telah ditindaklanjuti serta audit 2 standar Pendidikan	visitasi ke 26 sekolah untuk memastikan rekomendasi hasil surveillant sebelumnya telah ditindaklanjuti serta audit 2 standar Pendidikan	visitasi ke 26 sekolah untuk memastikan rekomendasi hasil surveillant sebelumnya telah ditindaklanjuti serta audit 2 standar Pendidikan	visitasi ke 26 sekolah untuk memastikan rekomendasi hasil surveillant sebelumnya telah ditindaklanjuti serta audit 2 standar Pendidikan	Disdikbud
10	1.1.1.1.1.1.25	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C	e-Learning untuk menyajikan materi pembelajaran secara online		Pelatihan e learning	Ujicoba e learning	Pelaksanaan e learning	Pelaksanaan e learning	Pelaksanaan e learning	Disdikbud
11	2.10.2.10.1.1.23	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Diseminasi Informasi melalui Media Massa (23.2)	BeritaMagelang.idLapor.go.id	-	2190 berita, 9 siaran	2190 berita, 10 siaran	2555 berita, 11 siaran	2555 berita, 12 siaran	2555 berita, 12 siaran	Diskominfo
12	2.10.2.10.1.1.23	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diseminasi informasi melalui media publik (23.3)	Smart Media Center	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Diskominfo

Master Plan *Smart City* Kabupaten Magelang

13	2.10.2.10.1.1.21	Program pengelolaan aplikasi informatika	Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD	SiYap (Sistem Layanan Cepat Tanggap)	Pembangunan Aplikasi, Sosialisasi	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	Diskominfo
14	4.1.4.1.3.6.34	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Pengembangan dan Pengelolaan Islamic Center (34.4)	Pembangunan Islamic Center	DED	Pembangunan Islamic Center	Pengelolaan Kelembagaan	Pengelolaan Kelembagaan	Pengelolaan Kelembagaan	Pengelolaan Kelembagaan	Kesra
15	2.8.1.6.1.1.26	Pembangunan Ketahanan Keluarga	Advokasi dan KIE Kampung KB bagi SKPD, Sosialisasi bagi Pokja Tingkat Kabupaten, Perencanaan dan Evaluasi Kampung KB	Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) memberikan pelatihan bagi masyarakat untuk Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Pencanangan 15 Kampung KB	Pencanangan 15 Kampung KB, Penggalangan Komitmen POKJA Tingkat Kabupaten	Pencanangan 15 Kampung KB, Evaluasi Kampung KB	Pencanangan 15 Kampung KB, Evaluasi Kampung KB	Pencanangan 15 Kampung KB, Evaluasi Kampung KB	Pencanangan 15 Kampung KB, Evaluasi Kampung KB	Dinsos PPKB PPPA
16			Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Penyusunan rumah data sosial		Pemutahiran Data Keluarga	Updating Data Keluarga	Updating Data Keluarga	Updating Data Keluarga	Updating Data Keluarga	Dinsos PPKB PPPA,

17	2.2.1.6.1.1.20	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Percepatan Pencapaian Menuju Kabupaten Layak Anak	Kampung Anak Sejahtera. Kampung Anak Sejahtera (KAS) merupakan pengentasan kekurangan gizi pada anak. Bentuk kegiatan : pembentukan relawan KAS yang bertugas memantau proses Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan memonitoring kesehatan anak. Pelatihan bagi orang tua tentang pemahaman pola asuh dan gizi, serta pemberian motivasi bagi orang tua agar terampil dalam memenuhi kebutuhan gizi	Pembentukan 5 Kampung Anak Sejahtera	Pembentukan 5 Kampung Anak Sejahtera	Pembentukan 5 Kampung Anak Sejahtera	Pembentukan 5 Kampung Anak Sejahtera	Pembentukan 5 Kampung Anak Sejahtera	Pembentukan 5 Kampung Anak Sejahtera	DINSOS PPKB PPA
18	1.6.1.1.1.23	Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Call center 112 - kekerasan dan gelandangan			Layanan PMKS pada Call Center	Layanan PMKS pada Call Center	Layanan PMKS pada Call Center	Layanan PMKS pada Call Center	DINSOS PPKB PPA



Master Plan *Smart City* Kabupaten Magelang

19	2.17.2.17.1.1.17	Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Pelayanan Perpustakaan	PUSPA GEMILANG	Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling	Integrasi 3 Layanan Perpustakaan Desa/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat/ Komunitas	Integrasi 3 Layanan Perpustakaan Desa/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat/ Komunitas	Integrasi 3 Layanan Perpustakaan Desa/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat/ Komunitas	Integrasi 3 Layanan Perpustakaan Desa/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat/ Komunitas	Integrasi 3 Layanan Perpustakaan Desa/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat/ Komunitas	DISPUSPA
<b>SMART ENVIRONMENT</b>											
1	1.4.1.4.1.1.25	Program pengembangan dan peningkatan kualitas perumahan	Perencanaan Perumahan	Sistem Informasi Database RTLH (SIM PKP)	Pembangunan Sistem Informasi Database RTLH (SIM PKP)	Updating Data	Updating Data	Updating Data	Updating Data	Updating Data	DPRKP
2	1.4.1.4.1.1.23	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyediaan PSU Permukiman	Sistem Informasi Layanan Pemakaman Umum (SIM PKP)						Aplikasi Sistem Informasi Layanan Pemakaman Umum (SIM PKP)	DPRKP
3	1.4.1.4.1.1.23	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyediaan PSU Permukiman	Sistem Informasi PSU Permukiman (SIM PKP)				Aplikasi Sistem Informasi PSU Permukiman	Updating Data	Updating Data	DPRKP
4	2.5.2.5.1.1.30	Program peningkatan kapasitas tata lingkungan hidup	Pengkajian dan pengembangan informasi lingkungan hidup	Sistem Informasi Komunikasi Lingkungan Hidup (SIKOLING)		Pembuatan Sistem Informasi	Pengelolaan Sistem Informasi	Pengelolaan Sistem Informasi	Pengelolaan Sistem Informasi	Pengelolaan Sistem Informasi	Dinas LH

5	2.5.2.5.1.1.31	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah	Pengurangan Sampah Berbasis Komunitas	Pembinaan, Inventarisasi, Lomba-lomba, Gerakan Pungut Sampah	Pembinaan, Inventarisasi, Lomba-lomba, Gerakan Pungut Sampah, Pembangunan Sistem Informasi, Publikasi	Pembinaan, Inventarisasi, Lomba-lomba, Gerakan Pungut Sampah, Pengelolaan Sistem Informasi, Publikasi	Pembinaan, Inventarisasi, Lomba-lomba, Gerakan Pungut Sampah, Pengelolaan Sistem Informasi, Publikasi	Pembinaan, Inventarisasi, Lomba-lomba, Gerakan Pungut Sampah, Pengelolaan Sistem Informasi, Publikasi	Pembinaan, Inventarisasi, Lomba-lomba, Gerakan Pungut Sampah, Pengelolaan Sistem Informasi, Publikasi	Dinas LH
6	2.5.2.5.1.1.31	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Penanganan Sampah	Revitalisasi TPSS	Revitalisasi TPSS, Pembangunan TPST, Pembangunan Sistem Informasi	Revitalisasi TPSS, Pembangunan TPST, Pengelolaan Sistem Informasi	Revitalisasi TPSS, Pembangunan TPST, Pengelolaan Sistem Informasi	Revitalisasi TPSS, Pembangunan TPST, Pengelolaan Sistem Informasi	Revitalisasi TPSS, Pembangunan TPST, Pengelolaan Sistem Informasi	Dinas LH
7	2.5.2.5.1.1.33	Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Konservasi Kawasan Resapan Air	Gerakan Pelestarian Sumber Mata Air Berbasis Ekonomi Masyarakat (GERTAS MABAS)	Sosialisasi, Pembentukan 10 Komunitas Jogo Tuk, Inventarisasi Mata Air, Penanaman Pohon, Penyelamatan Pohon Aren	Sosialisasi, Pembentukan 10 Komunitas Jogo Tuk, Inventarisasi Mata Air, Penanaman Pohon, Penyelamatan Pohon Aren, Pembangunan Sistem Informasi Sumber Mata Air	Sosialisasi, Pembentukan 10 Komunitas Jogo Tuk, Inventarisasi Mata Air, Penanaman Pohon, Penyelamatan Pohon Aren, Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Mata Air, Pembelian Lahan Sumber Mata Air	Sosialisasi, Pembentukan 10 Komunitas Jogo Tuk, Inventarisasi Mata Air, Penanaman Pohon, Penyelamatan Pohon Aren, Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Mata Air, Pembelian Lahan Sumber Mata Air	Sosialisasi, Pembentukan 10 Komunitas Jogo Tuk, Inventarisasi Mata Air, Penanaman Pohon, Penyelamatan Pohon Aren, Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Mata Air, Pembelian Lahan Sumber Mata Air	Sosialisasi, Pembentukan 10 Komunitas Jogo Tuk, Inventarisasi Mata Air, Penanaman Pohon, Penyelamatan Pohon Aren, Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Mata Air, Pembelian Lahan Sumber Mata Air	Dinas LH

Master Plan *Smart City* Kabupaten Magelang

	2.5.2.5.1.1.29	Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Layanan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Terakreditasi	Layanan Laboratorium Terakreditasi dan Pembangunan Sistem Informasi	Layanan Laboratorium Terakreditasi dan Pengelolaan Sistem Informasi	Layanan Laboratorium Terakreditasi dan Pengelolaan Sistem Informasi	Layanan Laboratorium Terakreditasi dan Pengelolaan Sistem Informasi	Layanan Laboratorium Terakreditasi dan Pengelolaan Sistem Informasi	Layanan Laboratorium Terakreditasi dan Pengelolaan Sistem Informasi	Dinas LH
--	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

### 5.3. Quick Win Smart City

Kabupaten Magelang dalam menjalankan program dan kegiatan yang tertuang dalam Master Plan Smart City, memiliki Program Quick Win yang merupakan program unggulan yang dilaksanakan dalam jangka pendek. Program Quick Win Smart City Kabupaten Magelang terdiri dari 3 program yang masing-masing masuk dalam Dimensi Smart Society, Smart Branding dan Smart Living. Program Quick Win Smart City Kabupaten Magelang dapat dilihat di tabel berikut.

No	Program Quick Win	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Pelaksana
1	Paseso	Smart Living	Terbentuk desa bersaudara untuk saling membantu saat terjadi bencana	BPBD
2	Jelajah Magelang	Smart Branding	1. Persentase jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi Jelajah Magelang 2. Jumlah desa yang sudah menginput data dan informasi kedalam aplikasi Jelajah Magelang 3. Jumlah log dan intensitas entry data pada aplikasi Jelajah Magelang 4. Jumlah konten yang di input kedalam aplikasi Jelajah Magelang	Diskominfo
3	Puspa Gemilang	Smart Living	1. Jumlah Pengunjung 2. Jumlah Perpustakaan yang menggunakan aplikasi perpustakaan terintegrasi	DISPUSPA

## BAB VI

### PENUTUP

Di dalam dokumen Master Plan *Smart City* Kabupaten Magelang ini disampaikan Program Inisiatif dan kerangka kerja *Smart City* dengan fokus pada implementasi peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi dan program berkelanjutan di daerah Kabupaten Magelang.

Selanjutnya dipaparkan profil serta kondisi Kabupaten Magelang saat ini yang mencakup visi dan misi, target pencapaian, kajian geografi dan demografi, struktur organisasi tata kerja perangkat daerah, serta fokus bidang strategi yang dijadikan sebagai landasan implementasi *Smart City* di Kabupaten Magelang dalam 6 (enam) bagian, yaitu:

1. Smart Governance
2. Smart Economy
3. Smart Living
4. Smart Society
5. Smart Branding
6. Smart Environment

Dari informasi profil, kondisi, dan potret arsitektur TIK di Kabupaten Magelang, dilakukanlah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) serta analisis risiko sehingga lahirlah rekomendasi implementasi *Smart City* Kabupaten Magelang dalam inisiatif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam bentuk *Roadmap Smart City* Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024.

Tiap inisiatif dalam *Roadmap Smart City* Kabupaten Magelang dijabarkan secara rinci sehingga bisa dijadikan sebagai panduan yang holistik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk melakukan implementasi inisiatif *Smart City*.

Dokumen Master Plan *Smart City* Kabupaten Magelang ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel yang harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kebutuhan masyarakat Kabupaten Magelang, serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang termasuk semua instansi Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yang tercakup di dalamnya. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah bahwa Master Plan *Smart City* Kabupaten Magelang ini harus selalu selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah serta masyarakat Kabupaten Magelang.

Pada akhirnya, dokumen Master Plan *Smart City* Kabupaten Magelang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan strategis dalam membangun *Smart City* di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun ke depan.